



**PENGARUH *PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDY EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Dewi Agustin
022114321

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2018**

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDY EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Dewi Agustin
022114321



Dekan Fakultas Ekonomi

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDY EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017)**

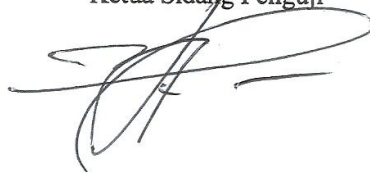
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Kamis, Tanggal: 25/10/2018

Dewi Agustin
022114321

Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji



(Monang Situmorang, Ak., M.M., CA)

Ketua Komisi Pembimbing



(Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A)

Anggota Komisi Pembimbing



(Haqi Fadillah, S.E., M.Ak)

ABSTRAK

DEWI AGUSTIN. 022114321. Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan *Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017). Di bawah bimbingan Ketut Sunarta dan Haqi Fadillah.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari *tax planning*. *Tax avoidance* diartikan sebagai upaya untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan. *Profitabilitas*, *leverage* dan *corporate governance* memiliki peluang yang sangat luas dalam melakukan tindakan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalisir pembayaran pajak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *verifikatif explanatory survey* dengan menggunakan data sekunder. Metode penarikan *sampling* pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Terdapat 13 perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI, dari 13 perusahaan didapatkan 5 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam memilih *sampling*. metode pengolahan atau analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas, uji heteroskedisitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (t) variabel *profitabilitas* dengan indikator ROA (*Return on Asset*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Untuk variabel *leverage* dengan indikator DER (*Debt to Equity Ratio*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian variabel *Corporate Governance* yang menggunakan indikator komisaris independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Kemudian secara simultan (F) *profitabilitas*, *leverage* dan *corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Tax Avoidance*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanhu wa ta'ala atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017”**. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Program Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bimbingan dan arahan serta berbagai masukan yang positif, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada beliau sebagai berikut:

1. Kedua Orang Tua yang senantiasa mendidik, mendukung, mendoakan dan telah mencurahkan segala daya upaya baik dari segi moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu yang bermanfaat, nasehat serta saran dalam penyusunan penelitian ini.
5. Bapak Haqi Fadillah, S.E., M.Ak. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu yang bermanfaat, nasehat serta saran dalam penyusunan penelitian ini.
6. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan saran dan arahan demi lancarnya penyusunan penelitian ini.
7. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak. selaku Asisten Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan gambaran dan bimbingan mengenai penelitian ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, khususnya Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
9. Kepada Kakakku Uchi yang selalu mendoakan dan mendukung serta memberi motivasi baik dari segi moril maupun materil kepada penulis.
10. Kepada para sahabat sekaligus teman seperjuanganku Naomi, Farida, Dimas, Jujus, Kevin, Caki, dan Obed yang selalu menemani, menghibur, membantu, dan

memberikan saran, nasihat dalam bidang akademik maupun kehidupan dan dukungan dalam setiap “manis, asam, pahit” proses yang dilewati penulis selama ini

11. Kepada teman seperjuangan bimbingan Santi, Bebey, Sarah, Poppy, Hilda, Nurus, Shella, Anky, dan teman-teman bimbingan lainnya yang sampai saat ini masih sering menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Kepada teman-teman kelas H Akuntansi terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
13. Kepada sahabatku, Cecil, Nda, Joko, Om Dimas yang selalu mendoakan. Kalian sahabat terbaik.
14. Kepada Kak Budi, Kak Dika, Kak Fikri, Kak Yudis terimakasih atas doa dan support kalian selama menjadi pendengar keluh kesah dalam penyusunan penelitian ini. Kalian abang terhebat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bogor, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	10
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	10
1.2.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.3.1 Maksud Penelitian.....	11
1.3.2 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.4.1 Kegunaan Teoritik	12
1.4.2 Kegunaan Praktik.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Keagenan.....	13
2.2 Teori Sinyal	14
2.3 Penghindaran Pajak	16
2.3.1 Perlawanan Terhadap Pajak.....	17
2.3.2 Cara Penghindaran Pajak	17
2.3.3 Skema Penghindaran Pajak.....	17
2.4 <i>Profitabilitas</i>	20
2.5 <i>Leverage</i>	22
2.6 <i>Corporate Governance</i>	24
2.6.1 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	25
2.6.2 Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	26
2.7 Penelitian Terdahulu	29
2.8 Kerangka Pemikiran	33
2.8.1 Pengaruh <i>Profitabilitas</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	34
2.8.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Aoidance</i>	34
2.8.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap <i>tax Avoidance</i>	35
2.9 Hipotesis Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	37
3.2.1 Objek Penelitian.....	37
3.2.2 Unit Analisis Penelitian	37
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	37

3.4	Operasionalisasi Variabel	38
3.5	Metode Penarikan Sampel	39
3.6	Metode Pengumpulan Data	40
3.7	Metode Pengolahan Analisis Data	40
3.7.1	Uji Asumsi Klasik.....	40
3.7.2	Analisis Regresi Berganda.....	42
3.7.3	Pengujian Hipotesis	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Hasil Pengumpulan Data	46
4.2.	Kondisi <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI	47
4.2.1	Kondisi <i>Profitabilitas</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI	47
4.2.2	Kondisi <i>Leverage</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI	49
4.2.3	Kondisi <i>Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI	51
4.2.4	Kondisi <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI	53
4.2.5	Statistik Deskriptif	54
4.3.	Analisis Data	55
4.3.1.	Uji Asumsi Klasik	55
4.3.2.	Uji Hipotesis	58
4.3.3.	Analisis Regresi Linear Berganda	61
4.4.	Pembahasan	63
4.4.1.	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI periode 2013-2017	63
4.5.	Interpretasi Hasil Penelitian	64
4.5.1.	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	64
4.5.2.	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	65
4.5.3	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	65
4.5.4	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	66

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	68
5.2.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Nama Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017	3
Tabel 2	Daftar Nama Perusahaan yang menjadi Sampel Penelitian Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017	4
Tabel 3	Rata-Rata <i>Cash Effective Tax Rate</i> Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017	4
Tabel 4	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 5	Penelitian Terdahulu	33
Tabel 6	Operasional Variabel	38
Tabel 7	Penseleksian Sampel Penelitian	39
Tabel 8	Daftar Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian	40
Tabel 9	Kriteria Perusahaan yang Menjadi Sampel	46
Tabel 10	Daftar Perusahaan Subsektor Otomotif dan Komponen yang Menjadi Objek Penelitian	47
Tabel 11	Data <i>Return On Asset</i> (ROA) Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017	48
Tabel 12	Data <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017	50
Tabel 13	Data Dewan Komisaris Independen Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017	52
Tabel 14	Data Perhitungan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Perusahaan dengan Metode Cash ETR Periode 2013-2017	54
Tabel 15	Hasil Statistik Deskriptif	55
Tabel 16	Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-smirnov Test	56
Tabel 17	Hasil Uji Multikolonieritas	57
Tabel 18	Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Spearman's rho	57
Tabel 19	Hasil Uji <i>Run Test</i>	58
Tabel 20	Hasil Uji Model Summary	59
Tabel 21	Hasil Uji t	60
Tabel 22	Hasil Uji ANOVA	61
Tabel 23	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	62
Tabel 24	Ringkasan Hasil Penelitian	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kondisi <i>Return on Asset</i> pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017.....	6
Gambar 2	Kondisi <i>Debt to Equity Ratio</i> pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017.....	7
Gambar 3	Kondisi <i>Corporate Governance</i> pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017	8
Gambar 4	Skema Kerangka Pemikiran Penelitian	36
Gambar 5	Grafik Pertumbuhan <i>Return on Asset</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017	48
Gambar 6	Grafik Pertumbuhan <i>Debt to Equity Ratio</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017.....	50
Gambar 7	Grafik <i>Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabel Perhitungan *Return On Asset*
- Lampiran 2. Tabel Perhitungan *Debt To Equity Ratio*
- Lampiran 3. Perhitungan Komposisi Dewan Komisaris Independent
- Lampiran 4. Perhitungan Cetr (*Cash Effective Tax Rate*)
- Lampiran 5. Laporan Keuangan Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan
Komponen Periode 2013 - 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak selalu mengalami perkembangan yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan. Bagi perusahaan, pajak merupakan suatu biaya atau beban yang nantinya akan mengurangi laba bersih perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan ke kas negara juga besar, sedangkan bagi negara pajak dianggap sebagai penghasilan yang harus dipungut untuk kesejahteraan negara. Oleh sebab itu pemerintah sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pajak ini.

Bagi perusahaan pajak menjadi beban yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga banyak kasus perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Lim (2012) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang diartikan sebagai penghematan pajak yang muncul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan perundang-undangan perpajakan.

Fenomena adanya praktik penghindaran pajak ini telah memunculkan beberapa kasus dalam pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui. Seperti yang dimuat dalam media online www.forumpajak.org pada tanggal 19 Februari 2016 yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh IKEA (perusahaan raksasa bemarkas di Swedia) yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 2009-2014, sebagaimana yang dilaporkan oleh media *independent*, perusahaan yang bergerak dibidang industri peralatan rumah tangga ini dikabarkan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 Milyar.

Kemudian fenomena berikutnya adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Toyota yang dimuat berita online (www.tempo.com) yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Kasus Toyota di Indonesia terendus setelah DJP secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada tahun 2005. Belakangan pajak Toyota pada tahun 2007 dan 2008 juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak pada tahun-tahun itu, dan meminta negara mengembalikannya (restitusi). Dari pemeriksaan SPT Toyota pada tahun 2005 itu, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan. Pada tahun 2004 misalnya, laba bruto Toyota anjlok > 30% dari 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain, rasio *gross margin* atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menyusut dari sebelumnya 14,59 % (2003) menjadi 6,58 % setahun kemudian.

Meski laba turun, omzet produksi dan penjualan mereka pada tahun tersebut justru naik 40%. Hal tersebut memicu kecurigaan petugas pemeriksa pajak. Kemudian petugas pemeriksa pajak pun menemukan jawabannya ketika memeriksa struktur harga penjualan dan biaya Toyota dengan seksama. Disinilah jejak *transfer pricing* perseroan ini mulai tercium. Toyota diduga memainkan harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar.

Selain itu terdapat pula fenomena atau peristiwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) lainnya yang terjadi di Indonesia adalah dimuat berita online (<https://www.merdeka.com>) pada tanggal 27 Agustus 2013. Dalam berita tersebut mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan bahwa ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak melakukan kewajibannya kepada negara. Agus Martowardojo mengatakan terdapat hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama 7 tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*Parent Company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Dari laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar kepada *holding company* di Belanda, dari 3,5 % meningkat ke 5 hingga 8 % mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, *consumer goods* tersebut stagnan pada angka Rp 27 Triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 % menjadi 8%, berarti terdapat kenaikan royalti sebesar 4,5% dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. Potensi *loss* PPh badan tahun 2015 adalah Rp 1,215 triliun dikalikan 25% atau sebesar Rp 303 milyar. Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sebagai sumber penghasilan, karena 8% harga produk dibayar rakyat Indonesia masuk ke royalti *holding company*. Peristiwa ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan masalah yang sangat besar dan utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa disengaja, hal tersebut sesuai dengan Annisa (2012) yang menyatakan bahwa aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya meminimalisasi/penghematan kewajiban pajak perusahaan. Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan baik berasal dari kelemahan perundang-undangan yang berlaku maupun berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Upaya meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance* yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam undang-undang perpajakan.

Pada penelitian ini penulis memilih sample pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 2013-2017. Pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen terdapat 13 perusahaan. Berikut adalah daftar perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2013-2017.

Tabel 1
Daftar Nama Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen
Periode 2013-2017

NO	KODE SAHAM	NAMA EMITEN	TANGGAL IPO
1	ASII	PT. Astra International Tbk	04 April 1990
2	AUTO	PT. Astra Otoparts Tbk	15 Juni 1998
3	BOLT	PT. Garuda Metalindo Tbk	07 Juli 2015
4	BRAM	PT. Indo Kordsa Tbk	05 September 1990
5	GDYR	PT. Goodyear Indonesia Tbk	01 Desember 1980
6	GJTL	PT. Gajah Tunggal Tbk	08 Mei 1990
7	IMAS	PT. Indomobil Sukses International Tbk	15 September 1933
8	INDS	PT. Indospring Tbk	10 Agustus 1990
9	LPIN	PT. Multi Prima Sejahtera Tbk	05 Februari 1990
10	MASA	PT. Multistrada Arah Sarana Tbk	09 Juni 2005
11	NIPS	PT. Nipress Tbk	24 Juli 1991
12	PRAS	PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk	12 Juli 1990
13	SMSM	PT. Selamat Sempurna Tbk	09 September 1996

Sumber: www.sahamok.com

Sektor otomotif memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Industri ini memiliki mata rantai yang lengkap mulai dari pembuatan komponen, produksi, dan perakitan kendaraan, jaringan distribusi dan penjualan hingga pelayanan penjualan. Semakin banyaknya kuantitas perusahaan otomotif merupakan salah satu bukti, bahwa industri otomotif telah menarik banyak pihak. Hal ini didasari fakta bahwa kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya selama ini ditopang oleh sisi domestik yang memiliki daya beli tinggi untuk menghadapi peningkatan permintaan masyarakat akan alat transportasi, para pabrikan mobil di Indonesia berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi dan kualitas barang yang dihasilkannya. Kemudian dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan sebagai bukti bahwa meningkatnya angka penjualan di Indonesia.

Dari hal tersebut disimpulkan dari peningkatan jumlah penjualan diartikan bahwa perusahaan otomotif merupakan perusahaan yang mampu menghasilkan laba perusahaan yang fantastis. Dari hal itu, kemungkinan besar adanya terjadi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen.

Dari 13 perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2013-2017 diperoleh lima perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sample dalam penelitian ini. Berikut adalah daftar perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang menjadi sample dalam penelitian.

Tabel 2
Daftar Nama Perusahaan yang menjadi Sampel Penelitian Pada
Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017

NO	PERUSAHAAN	TANGGAL IPO
1.	PT Astra Internasional Tbk (ASII)	04 April 1990
2.	PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)	15 Juni 1998
3.	PT Indo Kordsa Tbk (BRAM)	05 September 1990
4.	PT Nipress Tbk (NIPS)	24 Juli 1991
5.	PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM)	09 September 1996

Sumber: www.sahamok.com

Tabel 3
Rata-Rata Cash Effective Tax Rate Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan
Komponen Periode 2013-2017

NO	PERUSAHAAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PT Astra Internasional Tbk (ASII)	23%	20%	33%	24%	22%
2.	PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)	20%	24%	48%	28%	41%
3.	PT Indo Kordsa Tbk (BRAM)	67%	34%	28%	22%	30%
4.	PT Nipress Tbk (NIPS)	32%	35%	44%	25%	47%
5.	PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM)	20%	25%	26%	21%	23%

Sumber data: www.idx.co.id 2018

Dari tabel diatas sebanyak empat perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaraan pajak (*tax avoidance*) ASII, AUTO, BRAM dan SMSM yang didasari dengan perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang telah dihitung oleh penulis dimana keempat perusahaan tersebut memiliki nilai CETR dibawah 25%. Sedangkan NIPS tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak karena memiliki nilai CETR diatas 25%.

Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2017) yang menyatakan bahwa apabila nilai CETR lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak statutori yaitu sebesar 25% maka perusahaan dinilai lebih agresif dalam aktivitas perencanaan pajaknya.

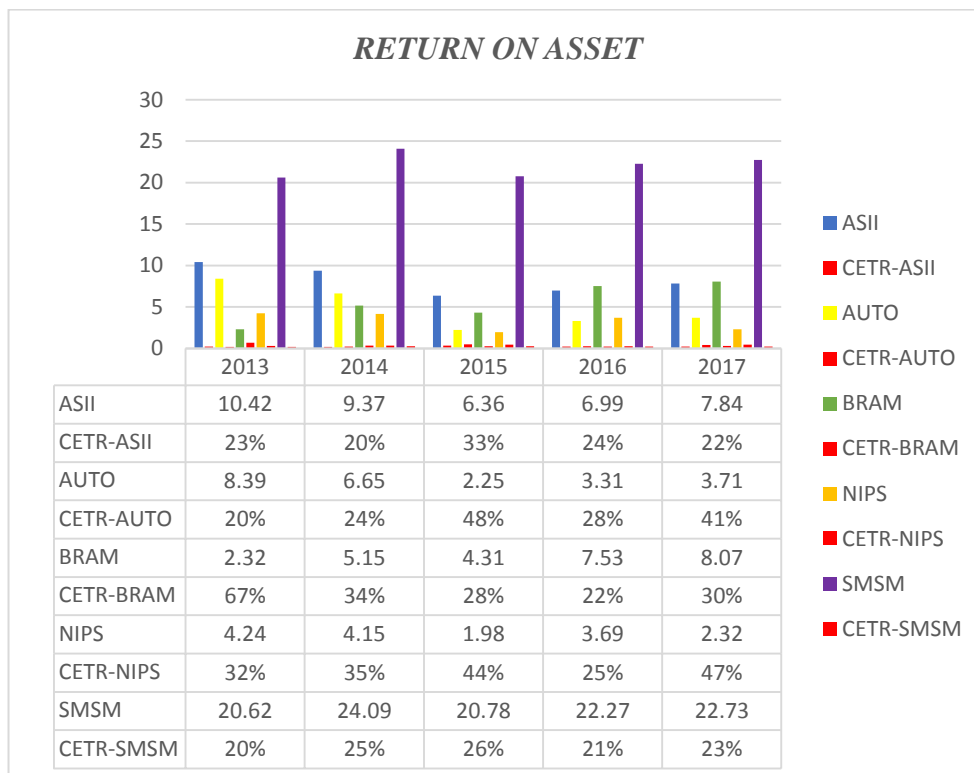
Perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak didorong dengan berbagai motivasi yang diinginkan oleh manajemen salah satunya untuk meningkatkan kepentingan dari bagian manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari hal tersebut tindakan yang dilakukan oleh perusahaan secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Pada teori keagenan dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Sedangkan pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian terjadi konflik kepentingan antara

perusahaan dengan pemerintah. Sehingga memotivasi *agent* untuk melakukan penghindaran pajak dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar ke pemerintah.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut antara lain dipengaruhi oleh *profitabilitas*, *leverage* dan *corporate governance*. *Profitabilitas*, *leverage* dan *corporate governance* dinilai sebagai indikator adanya kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mempengaruhi besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.

Dalam penelitian ini penulis meneliti hubungan *Profitabilitas* dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA), karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Semakin tinggi nilai ROA maka akan memberikan efek terhadap penjualan saham, artinya laba perusahaan akan meningkat. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) angka ROA dapat dikatakan baik apabila $>2\%$. Sedangkan *leverage* menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), DER mencerminkan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang, selain itu rasio ini juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Kemudian *corporate governance* menggunakan indikator Komisaris Independen. Komisaris Independen bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berikut adalah kondisi *Return on Asset* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2013-2017.



Gambar 1

Kondisi *Return on Asset* pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017

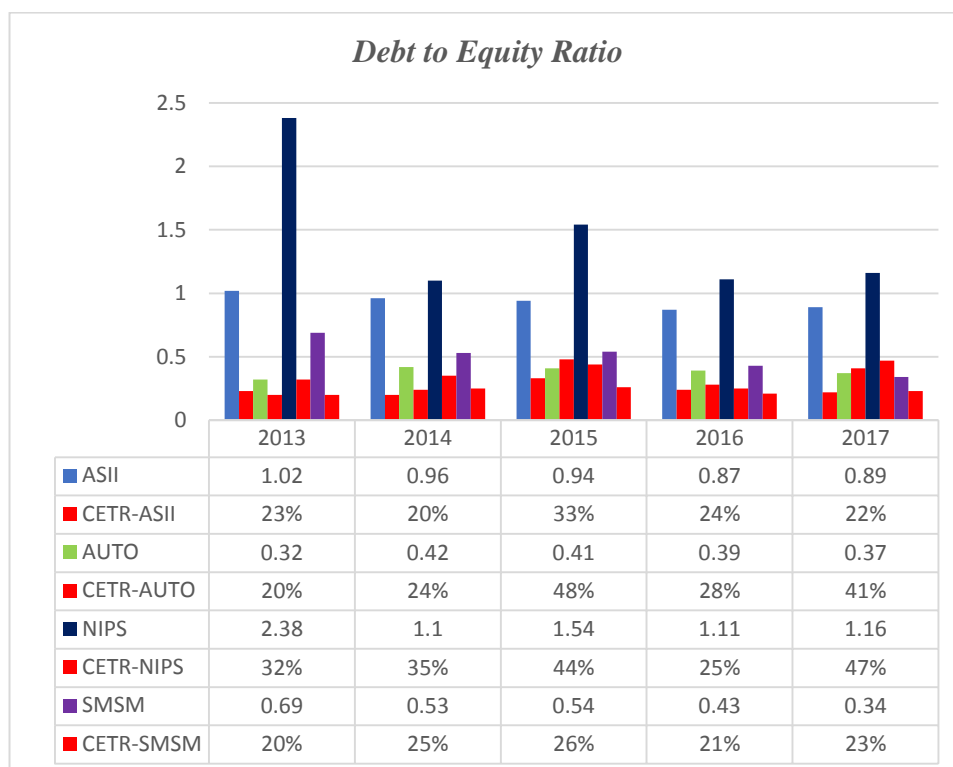
Profitabilitas diartikan sebagai indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan, selain itu *profitabilitas* juga merupakan rasio utama dalam laporan keuangan karena tujuan utama perusahaan adalah untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya. Angka ROA dikatakan baik apabila memiliki nilai sebesar $>2\%$. Apabila nilai rasio tinggi maka menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut besar. Apabila laba perusahaan tinggi maka beban pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Hal ini menyebabkan timbulnya tindakan penghindaran pajak, karena perusahaan menginginkan membayar pajak serendah mungkin untuk tetap menghasilkan laba yang tinggi.

Dilihat dari grafik di atas dapat diketahui bahwa angka *return on asset* setiap perusahaan berada di angka $>2\%$. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan *profitabilitas* setiap perusahaan. Akan tetapi nilai CETR masih dibawah 25%, hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Selain *profitabilitas* dalam penelitian ini juga menggunakan *leverage*. *Leverage* adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa besar kegiatan perusahaan

dibiayai oleh hutang. Perusahaan yang dalam kegiatannya lebih banyak menggunakan hutang cenderung lebih tinggi resikonya, semakin tinggi rasio utang maka semakin tinggi pula tingkat resiko perusahaan, sehingga suku bunga makin tinggi. Dalam hal ini utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga. Dalam pasal 6 ayat 1(a) UU No 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa beban bunga dapat menjadi unsur pengurang beban pajak penghasilan.

Berikut adalah kondisi *debt to equity ratio* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2013-2017.



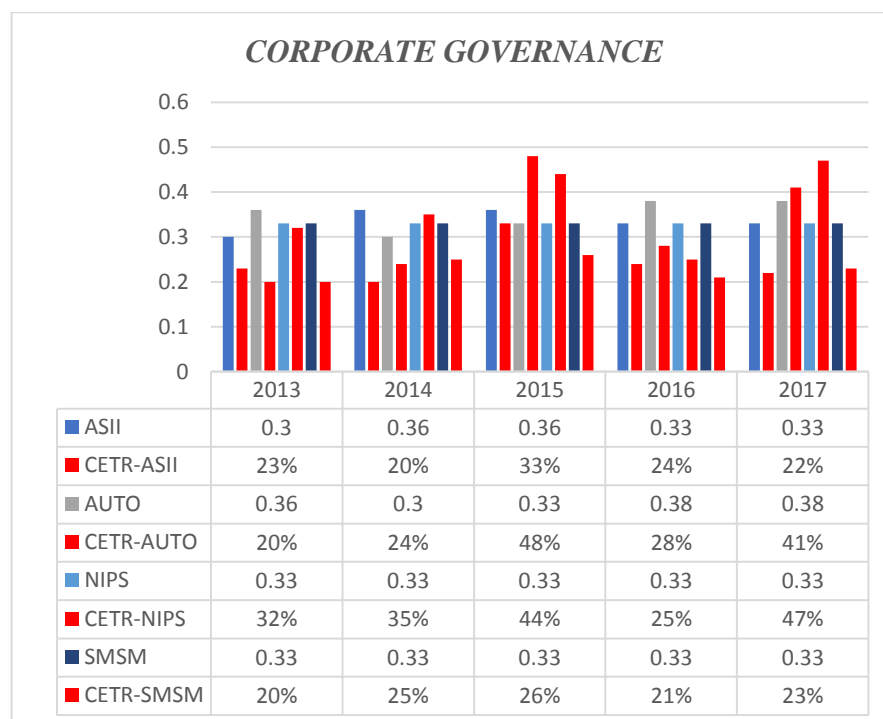
Gambar 2
Kondisi *Debt to Equity Ratio* pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa DER pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen pada tahun 2013-2017 mengalami *fluktuatif*. Dilihat dari peningkatan dan penurunan nilai *leverage* dan nilai CETR yang berada dibawah 25% dapat disimpulkan bahwa perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara berhutang sehingga dari hutang tersebut timbul beban bunga yang dapat menjadi unsur pengurangan beban pajak.

Selain *profitabilitas* dan *leverage* ada variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *corporate governance*. *Corporate governance* adalah sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya. *Corporate governance* dapat meningkatkan nilai tambah bagi para

pemegang saham. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik mekanisme *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan maka nilai tambahnya semakin besar. Aturan struktur *corporate governance* akan mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, namun disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan.

Berikut adalah kondisi *corporate governance* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2013-2017.



Gambar 3
Kondisi *Corporate Governance* pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017

Grafik diatas adalah hasil perhitungan *corporate governance* dengan indikator komisaris independen. Dari Grafik diatas dapat dilihat perusahaan ASII, AUTO, BRAM, NIPS dan SMSM memiliki nilai yang cukup baik. Dewan komisaris independent memiliki wewenang untuk mengawasi manajemen dalam melaksanakan tugasnya agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan nilai perusahaan, salah satunya adalah tindakan penghindaran pajak. Dilihat dari tabel diatas dewan komisaris independent sudah cukup banyak namun tindakan penghindaran pajak masih tetap dilakukan. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel bahwa nilai CETR berada dibawah 25%.

Hubungan antar *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governance* sangat erat dalam mendeteksi adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam meminimalisir pembayaran beban pajak serta memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-

besarnya, dalam hal ini pihak manajemen sangat berperan besar dalam mengelola sumber kekayaan perusahaan, peranan manajemen ini disebut dengan rasio *profitabilitas*. Semakin tinggi nilai rasio *profitabilitas* maka semakin baik, karena menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tersebut besar, semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar pula beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Hal tersebut memungkinkan bahwa pihak manajemen diduga melakukan tindakan penghindaran pajak dalam meminimalisir beban pajak dalam memkasimalkan laba perusahaan. Selain itu *leverage* juga diduga memiliki peran dalam tindakan penghindaran pajak, karena hutang akan menjadi beban tetap yang disebut dengan beban bunga, dan beban bunga ini yang akan menambah pengurangan dalam perhitungan beban pajak. Hal ini, menjadi celah bagi perusahaan dalam memanipulasi beban perusahaan agar terlihat laba perusahaan menjadi kecil, sehingga beban pajak yang dibayarkan juga kecil. Kemudian indikator selanjutnya adalah *corporate governance*. *Corporate governance* memiliki empat mekanisme, salah satu dari empat mekanisme tersebut adalah dewan komisaris independen, diduga dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dewan komisaris independen ini memiliki wewenang untuk mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan, dengan adanya keberadaan dewan komisaris independen ini akan membantu agar tidak terjadi tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebab perusahaan yang diketahui melakukan penghindaran pajak maka akreditabilitas perusahaan tersebut menjadi rendah sehingga akan berpengaruh buruk terhadap nilai perusahaan untuk kedepannya.

Berdasarkan uraian tersebut, mengindikasikan adanya pengaruh signifikan antara *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memicu untuk mengambil celah dalam pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Kurniasih (2013) yang menyatakan bahwa *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* sebelumnya sudah diteliti oleh Agusti (2014) yang menyatakan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Cahyono (2016) yang meneliti tentang pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (*size*), *leverage* dan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa komisaris independen, ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan *profitabilitas* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan

komite audit, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian Moses (2017) membuktikan bahwa *profitabilitas* dan *corporate governance* dengan proporsi komisaris independent tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian pada Penelitian Nursari (2016) membuktikan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, tetapi *leverage* dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan gap penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali yang berjudul **”Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017”**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara *transfer pricing*.
2. Banyak kasus yang terkait dengan penghindaran pajak. Contoh praktik penghindaran pajak yang terdapat diperusahaan besar contohnya yang di lakukan oleh Toyota dan IKEA. Terindikasi bahwa dalam operasional perusahaan manajemen melakukan penghindaran pajak agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan rendah.
3. Penggunaan hutang dapat menjadikan alternatif dalam meminimalisir pembayaran pajak.
4. Data perusahaan yang ditampilkan pada latar belakang mengindikasi ada beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara mempercepat pendapatan atau menunda pembayaran beban untuk tujuan mendapatkan bonus ataupun meminimalkan pembayaran pajak pada periode tersebut.
5. Penelitian ini bermaksud untuk menguji *profitabilitas, leverage, dan corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa masalah didalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governance* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis serta memperoleh data dan informasi yang relevan dari perusahaan subsektor otomotif dan komponen sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independent yakni *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap variabel dependen yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governance* secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian yang berarti bagi mahasiswa akuntansi untuk memperluas pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pada profitabilitas, leverage, dan corporate governance dan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu sebagai referensi penelitian berikutnya yang mungkin bisa dijadikan sebagai penelitian terdahulu.

1.4.2. Kegunaan Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terutama dalam manajemen pajaknya.
2. Bagi Investor
Memberikan pertimbangan untuk investor dalam mengambil keputusan investasi ketika akan melakukan penanaman modal pada suatu perusahaan dengan melihat laporan pajaknya.
3. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.
4. Bagi Pemerintah
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat mempertimbangkan kebijakan yang berlaku saat ini dengan membuat peraturan yang tegas tentang perpajakan di Indonesia. Sehingga dapat mempersempit celah perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, baik dengan cara legal maupun ilegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Ketika terdapat pemisahan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) disuatu perusahaan, maka terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan. Teori agensi merupakan teori yang dikembangkan oleh Jensen, M C, and W.H. Meckling (1976).

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajemen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Manajemen wajib bertanggung jawabkan semua upayanya kepada pemegang saham.

Menurut Anthony dan Govindarajan (1995) mengemukakan konsep teori *agency* sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* (dalam hal ini investor) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (manajemen) untuk melakukan tugas tertentu yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan antara manajer dan *principal* yang dikenal dengan sebagai teori keagenan (*agency theory*).

Dari uraian beberapa ahli penulis menyimpulkan bahwa teori agensi adalah konflik yang muncul yang disebabkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Perbedaan kepentingan itu didasari dengan sifat manusia yang mementingkan kepentingan diri sendiri sehingga memicu munculnya konflik perbedaan kepentingan antara *principals* dan *agent*.

Hubungan keagenan manajer (manajemen) dan *principal* (pemegang saham) dapat memicu adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) dimana manajemen sebagai pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan, tidak mengungkapkan beberapa informasi oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan termasuk investor sebagai *principal* (Jansen et al., 1990).

Hubungan antara pemegang saham dan manajemen didasarkan pada kontrak yang efisien, kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu:

1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri
2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Hubungan manajer dan *principals* secara teori keagenan juga menimbulkan konflik kepentingan (*agency conflict*) antar manajer dan prinsipal dimana masing-masing mementingkan dirinya sendiri (Amstrong et al., 2013). Persoalan tersebut menimbulkan biaya agesi (*agency cost*) antara manajer dan prinsipal, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya *enforcementnya*. *Agency Cost* ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang ditimbulkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Amstrong et al., 2013). Meminimalisir asimetri informasi dan konflik kepentingan maka pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Amstrong et al., 2013).

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah praktik penghindaran pajak, jika tidak dalam pengelolaan yang baik maka akan timbul konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi. Meminimalisir konflik tersebut maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik yakni dengan adanya transparansi informasi (Amstrong et al., 2013). Transparansi informasi dapat berkontribusi secara langsung terhadap kinerja ekonomi dengan mendisplinkan karyawan dalam perusahaan dan pemilihan investasi yang lebih baik, manajemen aset yang lebih efisien, dan mengurangi pengambil alihan kekayaan pemegang saham minoritas (Bushman et al., 2013), sehingga dapat meminimalisir dampak konflik kepentingan (*agency conflict*) dan memberikan nilai yang baik untuk perusahaan.

2.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Prasiwi (2015) menyatakan bahwa teori sinyal merupakan hubungan antara pemberian informasi perusahaan dan persepsi investor dimana teori sinyal sangat berperan penting dalam memberikan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar.

Menurut Fidhayatin dan Dewi (2012), informasi yang diberikan oleh suatu perusahaan sebagai sebuah pengumuman merupakan indikator yang dapat digunakan

sebagai dasar pengambilan keputusan investasi bagi investor. Dengan adanya *signaling theory*, investor akan diberikan kemudahan untuk mengambil keputusan dari informasi yang dikeluarkan perusahaan. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku bisnis dan investor karena pada dasarnya informasi ini memberikan gambaran dan keadaan yang terjadi di perusahaan baik saat ini maupun masa depan.

Asimetris informasi dapat berakibat buruk bagi persepsi investor mengenai perusahaan tersebut karena asimetris dapat menimbulkan dua masalah yaitu:

- 1) *Moral hazard* yaitu permasalahan jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam kontrak kerja
- 2) *Adverse selection* dimana *principal* tidak mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen-agen benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi kelalaian dalam tugas.

Menimalisir asimetris informasi dilakukan dengan cara pemberian informasi yang baik, dalam teori sinyal pemberian informasi dapat memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan sinyal tersebut dapat berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasi keinginan pemilik, dan sinyal yang diberikan juga dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lainnya (Jecksen et al., 1976).

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa teori sinyal merupakan teori yang membahas hubungan antara informasi yang diberikan oleh perusahaan sehingga dapat memberikan sinyal positif (*good news*) atau sinyal negatif (*bad news*) kepada investor. Sinyal tersebut menjadi dasar investor supaya dapat mengetahui prospek masa depan perusahaan sehingga dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, investor dapat membedakan perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik, sehingga di masa mendatang dapat memberikan keuntungan bagi investor.

Dalam kaitannya dengan tindakan penghindaran pajak, pihak manajer berpandangan praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan yang menghasilkan informasi laba setelah pajak yang tinggi diharapkan dapat memberikan sinyal positif yang dapat meningkatkan nilai perusahaan yang ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan di waktu ke waktu (Simarmata, 2012).

Praktik penghindaran pajak dapat dinilai sebagai sinyal positif maupun negatif (Hanlon et al. 2009). Penelitian Hanlon et al., (2009) membuktikan penghindaran pajak dipandang positif jika dipandang sebagai upaya dalam melakukan perencanaan pajak dan efisiensi pajak dan resiko kecil, dan penghindaran pajak dipandang negatif jika melakukan ketidakpatuhan karena tindakan tersebut beresiko tinggi yang akan timbul biaya yang tinggi pula, sehingga nilai perusahaan menjadi menurun.

2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Suandi (2008) dalam buku perencanaan pajak mendefinisikan bahwa “Penghindaran pajak adalah rekayasa “*Tax Affairs*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*)”. Penghindaran dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis dalam undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau bias juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

“*Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dalah upaya dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*noncountry to the law*) dimana metode dan Teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang” Pohan (2014).

Dalam penelitian Kurniasih (2013) penghindaran pajak adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax Avoidance* bukan merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Menurut Sumarsan (2013) menyebutkan bahwa “Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun terkadang dengan jelas menafsirkan undang-undang sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan undang-undang.

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang bertujuan untuk meminimalisir pembayaran pajak.

Menurut Sumarsan (2013) penghindaran pajak dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Menahan Diri
Adalah wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bias dikenai pajak.
2. Lokasi Terpencil
Yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang bertujuan untuk meminimalisir pembayaran pajak.

2.3.1. Perlawanan Terhadap Pajak

Melihat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

Menurut Sumarsan (2013) perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif adalah berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonominya.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah semua usaha dan pembuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ada 3 cara yaitu:

- a) Pengindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
- b) Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)
- c) Melalaikan Pajak

2.3.2. Cara Penghindaran Pajak

Tax avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Adapun cara penghindaran pajak menurut Merks dalam Kurniasih (2013) adalah sebagai berikut:

- a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*).
- c) Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

2.3.3. Skema Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak pada umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar, dan hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan. Beberapa skema

penggelapan pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam aktivitas *Foreign direct investment* adalah:

1. *Transfer Pricing*

Menurut Griffin dan Pustay (2015) mengartikan bahwa “*Transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan (transfer) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial”.

Dalam konteks perpajakan *transfer pricing* digunakan untuk mereayasa pembebanan harga suatu transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atau group perusahaan. Dari sisi negara, *transfer pricing* dapat mengakibatkan distorsi penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Griffin dan Pustay (2015) perusahaan multinasional berusaha untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak dengan cara “*they may manipulate transfer prices to shift reported profits from high-tax countries to low-tax countries*”. Skema *transfer pricing* yang umumnya dilakukan oleh perusahaan adalah:

- a) Menggelambungkan *inter company cost*.
- b) Membebankan biaya royalty atas pemakaian merek dagang milik induk perusahaan yang sebenarnya tidak diperlukan.
- c) Memperbesar biaya beban baku dan memperkecil penghasilan dan penjualan barang.
- d) Memperkecil omzet penjualan melalui transaksi maklon.
- e) Pinjaman saham melalui perusahaan PMA, dilakukan dengan cara:
 - Membebankan biaya bunga dari pinjaman pemegang saham kepada pemberi pinjaman diluar negeri
 - Penghindaran PPh pemotongan dan pemungutan (*with holding tax*), yaitu melalui praktik pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, dan praktik penggunaan bahan baku untuk perusahaan di luar negeri dan pemakaian merek dagang induk perusahaan tanpa pembayaran royaltikepada induk perusahaan di luar negeri.

2. Pemanfaatan *Tax Haven Country*

Merupakan suatu lokasi yang menawarkan kewajiban pajak yang rendah atau daerah yang tidak akan dikenakan pajak dimana para perusahaan melakukan usaha. Namun demikian, beberapa ahli perpajakan ada yang berpendapat bahwa negara *tax haven* tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena sifatnya sangat relatif, yaitu tergantung dengan ketentuan masing-masing negara. Suatu negara dapat saja disebut sebagai negara *tax haven* oleh negara lain apabila negara tersebut memberikan suatu insentif dalam kegiatan perekonomian disuatu daerah

dalam wilayah negara tersebut. Jadi, negara digolongkan sebagai negara *tax haven* atau tidak oleh negara lain tergantung dari definisi negara *tax haven* yang diberikan oleh negara lain tersebut.

3. *Thin Capitalization*

Merupakan modal terselubung melalui pinjaman yang melampaui batas kewajaran. Pinjaman dalam konteks ini adalah pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak pinjaman (Meliyana 2017).

Pada umumnya bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman yang bukan penduduk di negara peminjam dapat dijadikan pengurang pada penghasilan kena pajak. Sedangkan deviden tidak dapat dijadikan sebagai pengurang. Menurut Gunadi (1994) dalam Meliyana (2017), pemberian pinjaman dalam skema *thin capitalization* dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a) *Direct loan* adalah pinjaman diperoleh secara langsung dari investor (pemegang saham). Dari pinjaman tersebut investor mendapatkan bunga yang besarnya pada umumnya ditentukan oleh investor tersebut.
- b) *Back to back loan* adalah investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan pemberiannya imbalan.
- c) *Paralel loan* adalah investor luar negeri mencari mitra perusahaan Indonesia yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara investor. Sebagai imbalan atas pemberian pinjaman kepada anak perusahaan (Indonesia) di negara investor, selanjutnya investor meminta kepada perusahaan Indonesia untuk juga memberikan pinjaman kepada anak perusahaan milik investor di Indonesia.

4. *Treaty Shopping*

Tax treaty dapat dijadikan objek untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak, meskipun tujuan dari *tax treaty* pada hakekatnya adalah untuk mencegah penghindaran pajak. Skema *treaty shopping* dilakukan oleh penduduk penduduk suatu negara yang tidak memiliki *tax treaty* mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty* dan melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam *tax treaty*. Skema *treaty shopping* dilakukan untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas hanya boleh dinikmati oleh residen (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara yang mengikat perjanjian.

5. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Merupakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Skema CFC dilakukan

dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana wajib pajak dalam negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar atas investasi yang dilakukan di luar negeri adalah dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga deviden tidak dibagikan/diangguhkan. Upaya diatas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.

Dalam penelitian ini tax avoidance diukur dalam menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Penghidaran pajak dihitung dengan rumus, *Cash Effective Tax rate* (CETR) yaitu, kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyreng et al, 2010) dalam penelitian Moses Dicky R. (2017). Pengukuran *tax avoidance* dengan menggunakan CETR dalam penelitian Dessy Mayangsari (2017) menyatakan bahwa apabila nilai ETR lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak statutori yaitu sebesar 25% maka perusahaan dinilai lebih agresif dalam aktivitas perencanaan pajaknya.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Sumber: Dyreng et al, 2010)

Keterangan:

CETR : *Cash Effective Tax Rate*

Pembayaran Pajak : Beban Pajak yang dibayarkan pada periode terkait

Laba Sebelum Pajak : Laba sebelum pajak periode terkait

2.4 Profitabilitas

Tujuan akhir dalam suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu manajemen perusahaan dalam praktiknya diharuskan untuk mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Untuk mengukur tingkat laba atau keuntungan dalam suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas.

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi 2012)

Menurut Kasmir (2015) mendefinisikan “Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga

dapat memberikan ukuran tingkat suatu efektivitas manajemen dalam perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari suatu penjualan dan pendapatan investasi”.

Sedangkan menurut Hermanto dan Agung (2015) menyatakan bahwa “Rasio profitabilitas adalah hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan dan rasio ini akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas* merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan, selain itu profitabilitas juga adalah rasio utama dalam laporan keuangan, karena tujuan utama perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya.

Menurut Fahmi (2012), menyatakan bahwa dalam mengukur *profitabilitas* terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu: *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return on Investment*, *Return on Equity*. Dalam penelitian ini *profitabilitas* sebagai variabel bebas diukur dengan menggunakan ROA (*Return on Asset*):

1) *Gross Profit Margin* (GPM)

Gross Profit Margin merupakan perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka GPM akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Apabila harga pokok penjualan menurun maka GPM akan menurun. GPM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$GPM = \frac{\text{Sales} - \text{Cost Of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

Sumber: Irham Fahmi (2012)

Keterangan:

Sales-Cost Of Good Sold : Harga Pokok Penjualan

Sales : Penjualan

2) *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan, rasio ini akan menggambarkan penghasilan bersih perusahaan berdasarkan total penjualan. Pengukuran rasio dapat dilakukan dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. *Net Profit Margin* (NPM) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

Sumber: Irham Fahmi (2012)

Keterangan:

Earning After Tax (EAT) : Laba Bersih Setelah Pajak
Sales : Penjualan

3) *Return On Investment (ROI) / Return On Asset (ROA)*

Return On Investment (ROI) atau pengambilan investasi, bahwa direferensi lain rasio ini juga ditulis dengan *Return On Asset (ROA)*. Rasio ini merupakan rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik karena menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan dari penggunaan aset. Perusahaan yang memiliki nilai ROA yang tinggi disukai oleh investor dari pada perusahaan yang menunjukkan ROA yang rendah. Adapun ROI/ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROI/ROA = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Asset}}$$

Sumber: Irham Fahmi (2012)

Keterangan:

Earning After Tax (EAT) : Laba Bersih Setelah Pajak
Total Asset : Total Aset

4) *Return On Equity (ROE)*

ROE disebut juga laba atas equity. dalam beberapa referensi disebut juga dengan rasio *total asset turnover* atau perputaran total asset. Rasio ini menilai sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus ROE adalah sebagai berikut :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholders" Equity}}$$

Sumber: Irham Fahmi (2012)

Keterangan:

Earning Ater Tax (EAT) : Laba Bersih Setelah Pajak
Shareholders" Equity : Modal Sendiri

2.5 *Leverage*

Suatu perusahaan yang melakukan penggunaan utang yang terlalu tinggi akan memahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk kategori *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Kareana itu sebaiknya perusahaan harus

menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

Menurut Fahmi (2012) mendefinisikan ”*leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang”.

Menurut Kasmir (2015) menyatakan bahwa “rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan di likuidasi”.

Sedangkan menurut Hermanto dan Agung (2015) menyatakan bahwa “Rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang, rasio *leverage* yang mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak ketiga/pihak kreditor mengandung implikasi”.

Perusahaan yang dalam kegiatannya lebih banyak menggunakan utang akan lebih meningkatkan resiko perusahaan tersebut. Hal ini tentu membuat investor mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi karena tingkat resiko yang akan mereka hadapi. Semakin tinggi rasio utang maka semakin tinggi pula tingkat resiko perusahaan, sehingga suku bunga makin tinggi (Subramanyam dan Wild, 2012).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* digunakan bukan hanya untuk membiayai aktiva, modal serta membayar kewajiban perusahaan melainkan juga untuk memperbesar penghasilan perusahaan tersebut.

Ada beberapa rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat *leverage* pada suatu perusahaan yang mempunyai tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari pada biaya-biaya asset dan sumber dananya. Menurut Fahmi (2014) jenis-jenis rasio *leverage* diantaranya adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Long Term Debt to Equity Ratio* (LDER). Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan rasio DER (*Deep Equity Ratio*) yang terdiri dari utang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.

1) *Debt to Asset Ratio* (DAR)

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva suatu perusahaan dibiayai dengan hutang. Para kreditor lebih menyukai rasio DAR yang rendah karena semakin rendah rasio ini artinya semakin aman bagi kreditor dari risiko kerugian yang akan terjadi apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (Brigham dan Houston, 2009). Menurut Fahmi (2014) rasio *Debt to Asset Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Sumber: Irham Fahmi (2014)

2) *Debt to Equity Ratio* (DER)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar total modal sendiri yang dibiayai dengan total hutang. Semakin tinggi DER maka akan menunjukkan semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar, hal ini memungkinkan menurunkan kinerja perusahaan, karena tingkat ketergantungan dengan pihak luar semakin tinggi (Brigham dan Houston, 2009). Menurut Fahmi (2014) rasio *debt to equity ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

Sumber: Irham Fahmi (2014)

3) *Long Term Debt to Equity Ratio* (LDER)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat hutang jangka panjang dibandingkan dengan total modal yang dimiliki suatu perusahaan. Maka, semakin rendah LDER maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang Utari *et. al*, (2014). *Long term debt to equity ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDER = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

Sumber: Irham Fahmi (2014)

2.6 *Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu pilar dari system ekonomi pasar. *Corporate Governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha disuatu negara.

Menurut Hendra dalam penelitian Rahmi Fadhilah (2014) *Corporate Governance* adalah study yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dalam hubungan antar sesamanya.

Sedangkan Menurut Haruman dalam penelitian Wirna Yola (2014) *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipasi dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan.

Menurut Cadbury Report dalam buku GRC (*Good Governance, Risk Management, and Compliance*) oleh Dr. Robertus M. Bambang Gunawan (2016) menyatakan bahwa “*the system by which organizations are directed and controlled* (suatu system yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi).

Berdasarkan beberapa definisi *good corporate governance*, Tjager dkk (2003) menyimpulkan bahwa *good corporate governance* pada intinya adalah mengenai

suatu system, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi mencapai tujuan organisasi. *Good corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

2.6.1. Prinsip *Good Corporate Governance*

Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip *corporate governance* berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin, sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau tata nilai yang berlaku di negara masing-masing. Menurut Agus (2011) Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini antara lain:

1) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham (*stakeholder*). Sedangkan komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawas dan wajib memberi nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

2) Pertanggung jawaban (*responsibility*)

Prinsip ini menurut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada UU, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

3) Keterbukaan (*Transparency*)

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

4) Kewajaran (*Fairness*)

Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5) Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip-prinsip bahwa pengelolaan perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder* yang ditentukan dalam UU maupun peraturan perusahaan.

2.6.2. Mekanisme *Good Corporate Governance*

1. Kepemilikan Institusional

Menurut Saptatinah dalam penelitian Okto (2015) menyatakan bahwa institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan investor individual.

Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba.

Menurut Shleifer dan Vishney dalam penelitian Nuralifmida (2011) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri.

Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

2. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali tidak memiliki hubungan afiliasi direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi dan manajemen atas

pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Di Indonesia, dewan manajemen disebut sebagai dewan direksi, dikepalai oleh direktur utama, dan dewan pengawas disebut sebagai dewan komisaris. Dewan komisaris sering dipakai untuk mewakili kepentingan dari berbagai kelompok *stakeholders*.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) menetapkan kriteria untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan, diantaranya yaitu:

- 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
- 2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Tidak berkerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya dan terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
- 5) Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- 6) Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang bias diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berfikir independen demi kepentingan perusahaan.
- 7) Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal serta peraturan lain yang terikat.

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer memiliki saham perusahaan dengan kata lain manajer tersebut pemegang saham perusahaan.

Menurut Herwaty dalam penelitian Okto (2015) menyatakan bahwa “kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer perusahaan merangkap jabatan manajer perusahaan sekaligus pemegang saham yang turut aktif dalam pengambilan keputusan.

Jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama seperti pemilik. Sehingga manajer dalam menjalankan operasi perusahaan

sering kali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, melainkan tergoda untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri.

4. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat.

Menurut Syamsul dalam buku Pasar Modal dan Manajemen Portofolio (2008:109) menyatakan bahwa “keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, dimana seorang diantaranya adalah seorang komisaris independent perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan 2 anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independent, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan akuntansi dan keuangan.

Komite audit bertugas memberikan pendapat professional yang independent kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang meliputi:

- 1) Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan serta proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- 2) Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- 3) Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan.
- 4) Menelaah efektifitas pengendalian internal perusahaan.
- 5) Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- 6) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi, pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independent yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 7) Komite audit wajib melaporkan hasil penelaahannya kepada seluruh anggota dewan komisaris, selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah laporan itu selesai dibuat. Komite audit wajib menyampaikan laporan aktifitasnya kepada dewan komisaris secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.

Dari keempat mekanisme diatas dalam penelitian ini *governance* menggunakan indikator komposisi komisaris independen. Komisaris independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia,

selain itu komisaris independent juga bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independent proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris.

Ukuran dalam Komposisi Komisaris Independen (KKI) yaitu menggunakan ukuran jumlah anggota dewan komisaris independent dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

$$KKI = \frac{\text{Jml. Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jml. Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

Sumber: Nurainun Bangun dan Vincent (2008)

Keterangan:

KKI= Komposisi Komisaris Independen

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu kepada beberapa dari penelitian sebelumnya, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu tersebut, yaitu:

Tabel 4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Penelitian
1	Wastan Wahyu Hidayat (2018)	Variabel Independen: <i>Profitabilitas, Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	<i>profitabilitas</i> dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak (p value < 0,05), sedangkan <i>leverage</i> tidak didukung dengan baik.
2	Deddy Dyas Cahyono (2016)	Variabel Independen: Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage dan Profitabilitas Variabel Dependen:	- Jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> (CETR) - Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (CETR) - Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap

		Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - penghindaran pajak - Ukuran perusahaan (size) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR) - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR) - <i>Profitabilitas</i> yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3	Estherita Yunika (2017)	<p>Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan, dan <i>Profitabilitas</i></p> <p>Variabel Dependen: Tarif Pajak Efektif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan dan <i>Profitabilitas</i> berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan Tingkat Hutang tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif - Pada Uji Simultan, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan, dan <i>Profitabilitas</i> berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
4	Moses Dicky Refa Saputra (2017)	<p>Variabel Independen: <i>Profitabilitas, Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, - Komisaris Independent berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - ROA dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
5	Tommy Kurniasih (2013)	<p>Variabel Independen: <i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance</i>, dan Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p>Variabel Dependen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Return on Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance</i>, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Return on Assets (ROA), Ukuran Perusahaan dan</i>

		<i>Tax Avoidance</i>	<p>Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i>.
6	Qania Tsany Putri Nurul Ulfa (2017)	<p>Variabel Independen: Tata Kelola Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Dewan Komisaris Independent berpengaruh negative secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
7	Nuralifmida Ayu Annisa (2012)	<p>Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Institusional tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komposisi Dewan Komisaris Independent tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris Independent tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, terdapat pengaruh yang signifikan kualitas audit terhadap <i>tax avoidance</i>.
8	I Gusti Ayu Cahya Maharani (2014)	<p>Variabel Independen: Pengaruh <i>Corporate Governance</i>, <i>Profitabilitas</i>, dan Karakteristik Eksekutif</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel yang berpengaruh negatif adalah Proporsi Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Komite Audit, dan ROA - Sedangkan Risiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> yang dilakukan

			perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode tahun pengamatan 2008-2012.
9	Yanuar Irawan (2017)	<p>Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>profitabilitas</i>, <i>leverage</i>, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan, <i>profitabilitas</i>, <i>leverage</i>, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak dan - <i>Profitabilitas</i> merupakan variable paling berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10	Mardiah Nursari (2016)	<p>Variabel Independen: <i>Profitabilitas</i>, <i>Leverage</i>, dan Kepemilikan Institusional</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
11	Vidiyanna Rizal Putri (2017)	<p>Variabel Independen: <i>Leverage</i>, <i>Profitability</i>, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>leverage</i> dengan proksi <i>debt to equity ratio</i> (DER) memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Sedangkan variabel <i>profitability</i> dengan proksi <i>return on asset</i> (ROA) memiliki pengaruh negative dan signifikan - Variabel ukuran perusahaan yang diproksi dengan logaritma natural dari total aset perusahaan menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap <i>cash effective tax ratio</i> (CETR) - Variabel proporsi Kepemilikan Institusional yang diproksi dengan INSTOW, indikator persentase jumlah saham

			yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar di perusahaan menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap CETR.
--	--	--	--

Sumber: Penelitian yang terkait (2018)

Tabel 5
Penelitian Terdahulu

Indikator Penghindaran Pajak	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Profitabilitas	Wastam Wahyu Hidayat (2018) Deddy Dyas Cahyono (2016) Estherlita Yunita (2017) Tommy Kurniasih (2013) I Gusti Ayu Cahya Maharani (2014) Yanuar Irawan (2017) Vidiyanna Rizal Putri (2017)	Moses Dicky Refa Saputra (2017) Mardiah Nursari (2016)
Leverage	Moses Dicky Refa Saputra (2017) Tommy Kurniasih (2013) Yanuar Irawan (2017) Mardiah Nursari (2016) Vidiyanna Rizal Putri (2017)	Wastam Wahyu Hidayat (2018) Deddy Dyas Cahyono (2016) Estherlita Yunika (2017)
Corporate Governance	Qania Tsany Putri Nurul Ulfah (2017) I Gusti Ayu Cahya Maharani (2014) Yanuar Irawan (2017)	Deddy Dyas Cahyono (2016) Nuralifmida Ayu Annisa (2012) Moses Dicky Refa Saputra (2017)

Sumber: penelitian yang terkait (2018)

2.8. Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan laba dari kegiatan operasionalnya, sehingga berbagai cara dilakukan untuk dapat mencapai tujuan bisnisnya agar dapat tetap bertahan di masa depan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan laba yang diperoleh yaitu dengan meminimalkan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, seperti beban pajak. Praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak jarang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meminimalkan beban yang harus dibayar kepada negara.

Semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara. Hal tersebut memicu munculnya tindakan penghindaran pajak yang tujuannya untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terutama bagian manajemen perusahaan yang berusaha untuk mencari celah dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan supaya beban pajak yang dibayarkan menjadi rendah dan laba perusahaan tetap tinggi. Banyak cara untuk meminimalisir beban pajak salah satunya yaitu dengan berhutang, melakukan tindakan *transfer pricing* dan lain sebagainya. Hal tersebut mengartikan bahwa tindakan penghindaran pajak sangatlah berpengaruh buruk terhadap perusahaan yang nantinya akan menurunkan kreditabilitas perusahaan dan juga akan merugikan negara.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kurniasih (2013), dan Irawan (2017) yang menyatakan bahwa *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan peluang yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengoptimalkan laba perusahaan, sehingga nilai perusahaan terlihat baik agar menarik minat para investor.

2.8.1. Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*

Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi semua beban atas pendapatan. *Profitabilitas* dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan para pemegang saham yaitu dalam bentuk membayar deviden dan laba ditahan. Apabila rasio *profitabilitas* tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa ada efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang tinggi mengakibatkan *profitabilitas* perusahaan juga meningkat. Apabila laba tinggi maka jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga tinggi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian Wastam (2018), Cahyono (2016), Yunita (2016), Kurniasih (2013), Maharani (2016), Irawan (2017) membuktikan adanya pengaruh signifikan *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak.

2.8.2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam kegiatan usaha nya perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi keperluan operasional dan kegiatan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dalam hal ini ada kemungkinannya penggunaan pinjaman oleh suatu perusahaan akan menghasilkan besarnya biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga dengan adanya bunga akan menambah unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak

akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan. Dari hal tersebut banyak perusahaan yang sengaja berhutang untuk mengurangi beban pajak, kesengajaan tersebut diduga merupakan salah satu bentuk dari tindakan penghindaran pajak.

Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat diperkirakan adanya peranan antara *leverage* yang dapat dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya tindakan penghindaran pajak. Penghindaran Pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang belum sempurna, sehingga dapat menjadi celah untuk meminimalisir beban pajak.

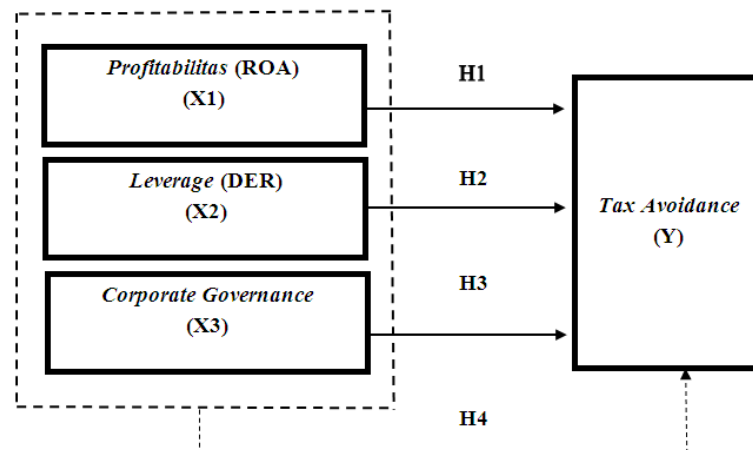
Berdasarkan penelitian Moses (2017), Kurniasih (2013), Irawan (2017), Nursari (2016) membuktikan adanya praktik penghindaran pajak dengan menggunakan *leverage*.

2.8.3. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme dari *good corporate governance*. Komisaris Independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terikat. Jika suatu perusahaan diketahui melakukan penghindaran pajak maka berdampak turunnya kredibilitas perusahaan jika tindakan tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang. Disinilah peran dewan komisaris dibutuhkan karena dengan adanya dewan komisaris independen maka manajemen perusahaan akan diawasi agar tidak terjadi tindakan penghindaran pajak.

Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat diperkirakan adanya pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Qaniya (2017), Maharani (2014), Irawan (2017) membuktikan adanya pengaruh signifikan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat mengenai pengaruh hubungan *profitabilitas*, *leverage* dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak, dapat disimpulkan menjadi kerangka pemikiran yang berbentuk grafik sebagai berikut.



Gambar 4
Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan:

- > = Secara Parsial
 - - - - -> = Secara Simultan

2.9. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut masih masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum mendapatkan fakta yang benar, mereka akan membuat dugaan tentang gejala, peristiwa atau masalah yang menjadi titik perhatiannya tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka dapat diajukan suatu hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : *Profitabilitas* perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- H2 : *Leverage* perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektot otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- H3 : *Corporate Governance* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- H4 : *Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey*. *Explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Metode yang digunakan juga merupakan data kuantitatif hal ini disebabkan karena data yang digunakan berupa angka-angka (skala rasio) dan analisis yang menggunakan statistik.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara variabel independen, yaitu *profitabilitas*, *leverage* dan *corporate governance* variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema penelitian atau sesuai dengan tema judul yang akan diteliti. Adapun objek penelitian pada penelitian ini yaitu *profitabilitas*, *leverage* dan *corporate governance* variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

3.2.2 Unit Analisis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, yang dijadikan unit analisis penelitian ini adalah *organization*. Unit analisis *organization* adalah sumber data yang unit analisisnya merupakan suatu organisasi sehingga data tersebut berasal dari suatu organisasi tertentu yaitu perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria dalam variabel penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

3.3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, bandingan, volume yang berupa angka-angka yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini mendapatkan data dan informasi melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) kemudian www.sahamok.com dan website perusahaan-perusahaan yang diajukan sebagai sampel penelitian.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen dan sebagai variabel yang mendahului. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah *profitabilitas*, *leverage* dan *corporate governance*.

2. Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi variabel lain (variabel independen). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*.

Tabel 6
Operasionalisasi Variabel
Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan *Corporate Governanance* terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Profitabilitas</i>	<i>Return On Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio
<i>Leverage</i>	<i>Deb to Equity Ratio (DER)</i>	$\frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Modal Sendiri}}$	Rasio
<i>Corporate Governance</i>	Komposisi Komisaris Independen	$\frac{\text{Jml. Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jml. Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$	Rasio
<i>Tax Avoidance</i>	<i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>	$\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

Sumber: Referensi, diolah oleh penulis (2018)

3.5. Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2015) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel dibutuhkan karena adanya keterbatasan dana, waktu, dan tenaga.

Penarikan sampel merupakan suatu proses pilihan sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karakteristik subjek sampel, memungkinkan untuk menggeneralisasikan karakteristik elemen populasi. Sudaryono (2017)

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Sampel penelitian ditarik menggunakan teknik *non-profitabilitas sampling* atau penarikan sampel secara tak acak dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). Sugiyono (2015).

Kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Tersedia laporan keuangan selama periode penelitian.
3. Perusahaan memiliki laba sebelum pajak positif berturut-turut selama periode pengamatan pada tahun 2013-2017 agar tidak mengakibatkan nilai CETR terdistorsi (Kurniasih dan Maria,2013)

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 5 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Adapun proses penseleksian sampelnya sebagai berikut:

Tabel 7
Penseleksian Sampel Penelitian

Kriteria	Sampel
Jumlah perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	13
Tersedia laporan keuangan selama periode penelitian.	11
Sampel yang memiliki laba sebelum pajak dengan nilai positif berturut-turut selama periode 2013-2017.	8
Data outlier	3
Jumlah Sampel yang terpilih	5

Sumber: Referensi, diolah oleh penulis (2018)

Tabel 8
Daftar Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	PT Astra International Tbk.	ASII
2	PT Astra Otoparts Tbk.	AUTO
3	PT Indo Kordsa Tbk.	BRAM
4	PT Nipress Tbk.	NIPS
5	PT Selamat Sempurna Tbk.	SMSM

Sumber : www.idx.co.id diolah oleh penulis (2018)

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui beberapa jenis metode pengumpulan data dan informasi, yaitu dengan cara penelitian data sekunder. Sehingga penulis untuk mendapatkan data dan informasi melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan perusahaan. Serta penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data dalam bentuk jadi atau teori dengan cara mempelajari, menelaah dan meneliti berbagai macam literatur, seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan variabel penelitian, laporan keuangan perusahaan, skripsi serta data-data lainnya.

3.7. Metode Pengolahan / Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Agar hasilnya memberikan bukti yang meyakinkan, umumnya peneliti menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data penelitian. Teknik-teknik statistik yang digunakan tergantung pada konteks jawaban atau pemecahan masalah yang diinginkan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan software SPSS 23. SPSS merupakan sebuah program untuk olah data statistik yang paling populer dan paling banyak pemakaiannya di seluruh dunia dan banyak digunakan oleh para peneliti untuk berbagai keperluan seperti riset pasar, untuk menyelesaikan tugas penelitian seperti skripsi, tesis dan sebagainya. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independent.

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah statistik yang harus dipenuhi pada analisis linear berganda yang berbasis *ordinal least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu uji normalitas, uji multikolienaritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji normalitas data (Kolmogorov smirnov)

Uji normalitas digunakan untuk menyelidiki apakah data yang dikumpulkan mengikuti dugaan distribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas dapat dengan memakai uji sebagai berikut:

- a. Kolmogorof-Smirnov, merupakan uji normalitas untuk sampel besar dan untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.
- b. Pengujian normal *probability* plot menurut Ghozali (2016) yaitu sebagai berikut:
 - 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal.
 - 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal.

2. Uji Multikolienaritas

Multikolienaritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji Multikolienaritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolienaritas.

Alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolienaritas adalah dengan *variance inflation factor* (VIF), korelasi person antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat *eigenvalues* dan *condition index* (CI) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolienaritas adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolienaritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolienaritas.

Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolienaritas adalah sebagai berikut:

- a. Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi.
- b. Menambah jumlah observasi.
- c. Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk *first difference delta*.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan juga berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji glejser dan dengan melihat grafik scatterplot. Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel dependen melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah tingkat kepercayaan 5%. Sementara itu diagram scatterplot dihasilkan melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Menurut Ghazali (2016) dasar pengambilan keputusan analisis uji heteroskedastisitas adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu secara teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2016) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu obeservasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtut waktu karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya.

3.7.2 Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear.

Output coefficients yang menunjukkan besarnya koefisien regresi masing-masing variabel independen sekaligus menunjukkan besarnya pengaruh *profitabilitas* (*return on asset*), *leverage* (*debt to equity ratio*) dan *corporater governance* (komisaris independen) sebagai variabel independen terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen, dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Setelah disajikan hasil analisis regresi linear berganda, kemudian akan disajikan pula hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std. Error of the estimate*)

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi linear berganda. Adapun variabel independen terdiri dari *profitabilitas (return on asset)*, *leverage (debt to equity ratio)* dan *corporater governance* (komisaris independen). Sedangkan variabel dependennya adalah *tax avoidance*.

Persamaan regresi yang diinterpretasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
 a : Konstanta
 $\beta_1 \beta_2$: Koefisien Regresi
 X_1 : Profitabilitas (*Return On Asset*)
 X_2 : *Leverage (Debt to Equity Ratio)*
 X_3 : Komisaris Independen
 e : error

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menguji signifikannya. Untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel dapat menggunakan uji statistik regresi linear berganda. Uji signifikan variabel independen dan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan, dapat dilakukan dengan uji statistik t (t-test) dan uji F (F-test).

Ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai akrual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f dan koefisien determinasinya. Suatu penghitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji yang dikehendaki statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). H_0 yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

1. Pengujian secara parsial (Uji t)

Uji parsial biasanya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah :

- a. Jika nilai t hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. Jika nilai t hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tingkat signifikan:

- 1) $H_{0.1}$ jika Sig. < 0,05 maka ROA secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
 $H_{1.1}$ jika Sig. > 0,05 maka ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 2) $H_{0.1}$ jika Sig. < 0,05 maka DER secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
 $H_{1.1}$ jika Sig. > 0,05 maka DER secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 3) $H_{0.1}$ jika Sig. < 0,05 maka Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
 $H_{1.1}$ jika Sig. > 0,05 maka Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah :

- a. Jika F_{hitung} yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih besar dari F_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
- b. Jika F_{hitung} yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari F_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tingkat signifikan:

- 1) $H_{0.4}$ jika Sig. < 0,05 maka ROA, DER dan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 2) $H_{1.4}$ jika Sig. > 0,05 maka ROA, DER dan Komisaris Independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

3. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. (Ghozali, 2016) Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1
- b. Bila $R^2 = 1$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- c. Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Penulis mendapatkan data dan informasi melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *website* perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Data mengenai *return on asset*, *debt to equity ratio*, dan komisaris independent merupakan data dari laporan keuangan tiap perusahaan pada periode 2013-2017 yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya pada perusahaan manufaktur. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari www.sahamok.com pada Tabel 1 dalam latar belakang BAB I bahwa perusahaan sub sektor otomotif dan komponen terdapat 13 perusahaan yang telah melakukan *intial public offering* atau telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan pada metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengambilan sampel *non* acak dengan jenis *purposive sampling* atau memberikan kriteria tertentu, maka perusahaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 9
Kriteria Perusahaan yang Menjadi Sampel

	Kriteria	Sampel
1	Jumlah perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	13
2	Tersedia laporan keuangan selama periode penelitian.	11
3	Sampel yang memiliki laba sebelum pajak dengan nilai positif berturut-turut selama periode 2013-2017.	8
4	Data outlier	3
	Jumlah Sampel yang terpilih	5

(Sumber: www.idx.co.id, diolah oleh penulis, 2018)

Berdasarkan pada kriteria serta kelengkapan data yang dikumpulkan oleh peneliti maka berikut ini nama perusahaan manufaktur yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 10
Daftar Perusahaan Subsektor Otomotif dan Komponen yang
Menjadi Objek Penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	ASII	PT Astra International Tbk.	04 April 1990
2	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk.	15 Juni 1998
3	BRAM	PT Indo Kordsa Tbk.	05 September 1990
4	NIPS	PT Nipress Tbk.	24 Juli 1991
5	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk.	09 September 1996

(Sumber: www.idx.co.id, diolah oleh penulis, 2018)

Total perusahaan subsector otomotif dan komponen yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah lima perusahaan dalam jangka waktu lima tahun sehingga jumlah sampel yang akan dijadikan data penelitian sebanyak 25 atau N= 25.

4.6. **Kondisi *Profitabilitas*, *Leverage* dan *Corporate Governance* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI**

4.2.3 **Kondisi *Profitabilitas* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI**

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2012). Dalam *Profitabilitas* terdapat beberapa rasio untuk mengukur *profitabilitas* diantaranya yaitu *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Investment* (ROI) / *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Pada penelitian ini *profitabilitas* diukur menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). *Return on Assets* merupakan rasio yang mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aset) yang dimilikinya (Kariyoto, 2017). Rasio *Return on Assets* dapat membantu investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada aset menjadi keuntungan (*profit*). Pengukuran *Return on Assets* dalam penelitian ini, menggunakan pendapatan setelah pajak dibagi dengan total aset perusahaan.

Return On Asset (ROA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROI/ROA = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Asset}}$$

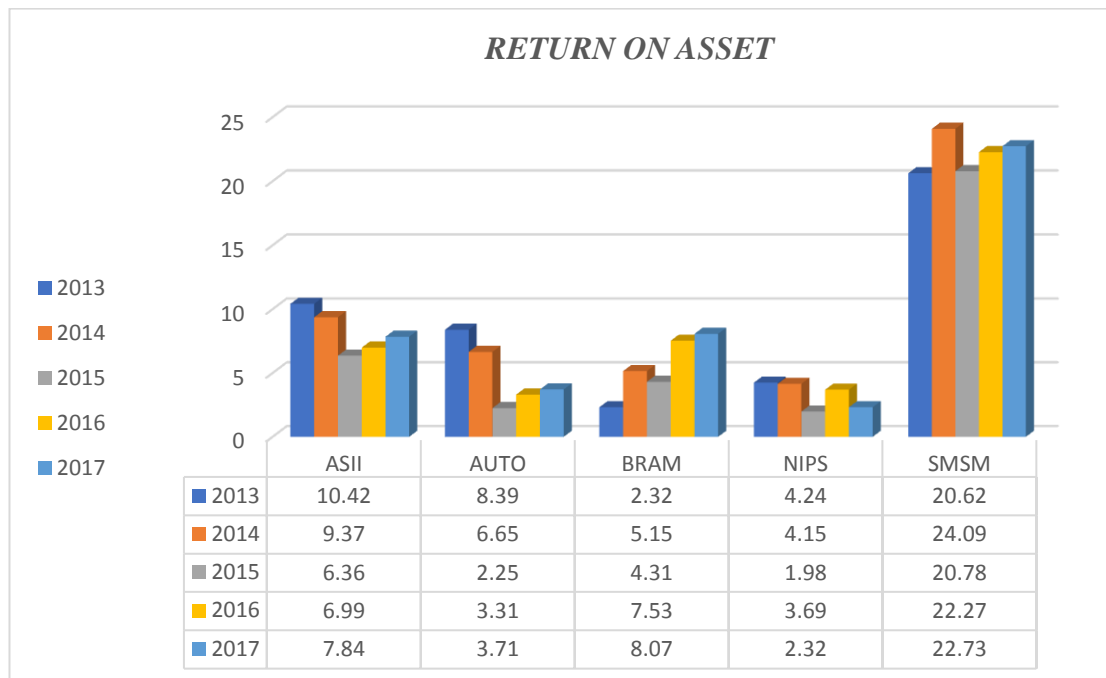
Sumber: Irham Fahmi (2012)

Berikut hasil perhitungan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen selama periode 2013-2017 yang disajikan pada tabel 11.

Tabel 11
Data Return On Asset (ROA) Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan
Komponen Periode 2013-2017
 (satuan persentase)

Kode Perusahaan	Return On Asset					Rata-rata Perubahan
	2013	2014	2015	2016	2017	
ASII	10,42	9,37	6,36	6,99	7,84	8,20
AUTO	8,39	6,65	2,25	3,31	3,71	4,86
BRAM	2,32	5,15	4,31	7,53	8,07	5,47
NIPS	4,24	4,15	1,98	3,69	2,32	3,27
SMSM	20,62	24,09	20,78	22,27	22,73	22,10
Rata-rata	9,20	9,88	7,14	8,76	8,93	8,78
Maksiman	20,62	24,09	20,78	22,27	22,73	22,10
Minimum	2,32	4,15	1,98	3,31	2,32	2,82

Sumber: www.idx.co.id data diolah penulis (2018)



Sumber: Data diolah penulis (2018)

Gambar 5
Grafik Pertumbuhan Return on Asset Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif
dan Komponen Periode 2013-2017

Berdasarkan pada Tabel 11 dan Gambar 5 terlihat bahwa pertumbuhan *Return on Asset* pada lima perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 mengalami *fluktuasi*. Pada tahun 2013-2017 pertumbuhan rasio ROA tertinggi dimiliki oleh PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) yaitu pada tahun 2013 sebesar 20,62%, pada tahun 2014 meningkat menjadi 24,09%, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3,31 yaitu menjadi 20,78%. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 kembali meningkat menjadi 22,27% dan 22,73%. Sedangkan pertumbuhan rasio ROA terendah pada tahun 2013 dimiliki oleh PT Indo Kordsa

Tbk (BRAM) yaitu sebesar 2,32%. Pada tahun 2014 dan 2015 rasio ROA terendah dimiliki oleh PT Nipress (NIPS) yaitu sebesar 4,15% dan 1,98%. Kemudian pada tahun 2016 rasio ROA dimiliki oleh PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) yaitu sebesar 3,31. Pada tahun 2017 rasio ROA terendah kembali terjadi pada PT Nipress Tbk (NIPS) yaitu sebesar 2,32%.

4.2.4 Kondisi *Leverage* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI

Leverage adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa besar kegiatan perusahaan dibiayai oleh hutang. Perusahaan yang dalam kegiatannya lebih banyak menggunakan hutang cenderung lebih tinggi resikonya, semakin tinggi rasio utang maka semakin tinggi pula tingkat resiko perusahaan, sehingga suku bunga makin tinggi. Dalam hal ini utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga. Dalam pasal 6 ayat 1(a) UU No 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa beban bunga dapat menjadi unsur pengurang beban pajak penghasilan. Terdapat beberapa rasio untuk mengukur rasio *leverage* diantaranya yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Long Term Debt to Equity Ratio* (LDER). Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan rasio DER (*Debt Equity Ratio*). *Debt to equity ratio* merupakan indikator struktur modal dan risiko finansial yang digunakan untuk mengukur perimbangan antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. *Debt to Equity Ratio* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang ditunjukkan pada beberapa bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Sumber: Irham Fahmi (2014)

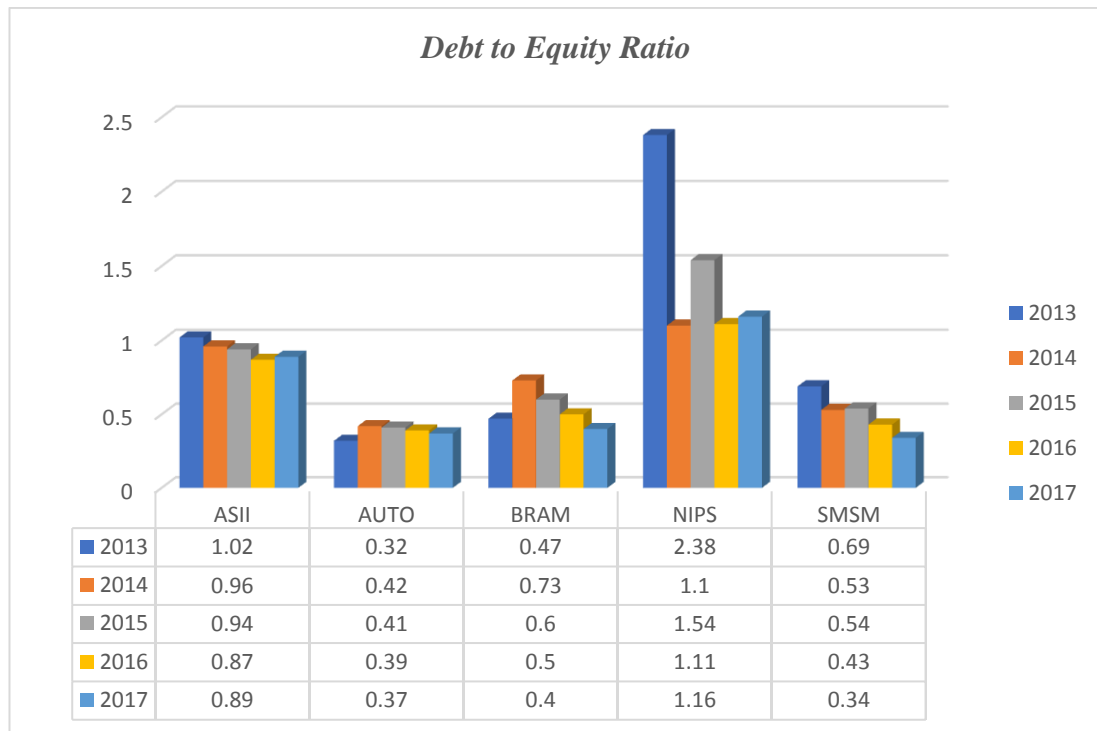
Berikut hasil perhitungan DER pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

Tabel 12
Data *Debt to Equity Ratio* (DER) Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017

Kode Perusahaan	<i>Debt to Equity</i>					Rata-rata Perubahan
	2013	2014	2015	2016	2017	
ASII	1,02	0,96	0,94	0,87	0,89	0,94
AUTO	0,32	0,42	0,41	0,39	0,37	0,38
BRAM	0,47	0,73	0,60	0,50	0,40	0,50
NIPS	2,38	1,10	1,54	1,11	1,16	1,46
SMSM	0,69	0,53	0,54	0,43	0,34	0,54
Rata-rata	0,98	0,75	0,81	0,66	0,63	0,76
Maksiman	2,38	1,10	1,54	1,11	1,16	1,46
Minimum	0,32	0,42	0,41	0,39	0,34	0,38

Sumber: www.idx.co.id data diolah penulis (2018)

Untuk memudahkan pembaca, penulis menyajikan grafik pertumbuhan *debt to equity ratio* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang mengalami fluktuasi pada tahun 2013-2017 sebagai berikut:



Gambar 6
Grafik Pertumbuhan *Debt to Equity Ratio* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017

Berdasarkan pada Tabel 12 dan Gambar 6 terlihat bahwa pertumbuhan *debt to equity ratio* pada lima perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 mengalami fluktuasi. Dari Tabel 12 dan Gambar 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai DER tertinggi selama tahun 2013-2017 berturut-turut terjadi pada PT Nipress Tbk (NIPS) yaitu pada tahun 2013 sebesar 2,38 pada tahun 2014 sebesar 1,10 pada tahun 2015 sebesar 1,54 pada tahun 2016 sebesar 1,11 dan pada tahun 2017 sebesar 1,16. Sedangkan nilai ROA terendah pada tahun 2013-2016 berturut-turut terjadi pada PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) yaitu pada tahun 2013 sebesar 0,32 pada tahun 2014 sebesar 0,42 pada tahun 2015 sebesar 0,41 dan pada tahun 2016 sebesar 0,39. Sedangkan pada tahun 2017 nilai DER terendah terjadi pada PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) yaitu sebesar 0,34.

4.2.3 Kondisi *Corporate Governance* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI

Good corporate governance pada intinya adalah mengenai suatu system, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi mencapai tujuan

organisasi. *Good corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Ada 4 mekanisme *corporate governance* diantaranya yaitu:

1. Kepemilikan Institusional
2. Dewan Komisaris Independen
3. Kepemilikan Manajerial
4. Komite Audit

Dari keempat mekanisme diatas dalam penelitian ini *governance* menggunakan indikator komposisi dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, selain itu dewan komisaris independen juga bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Ukuran dalam Komposisi Dewan Komisaris Independen yaitu menggunakan ukuran jumlah anggota dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jml. Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jml. Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

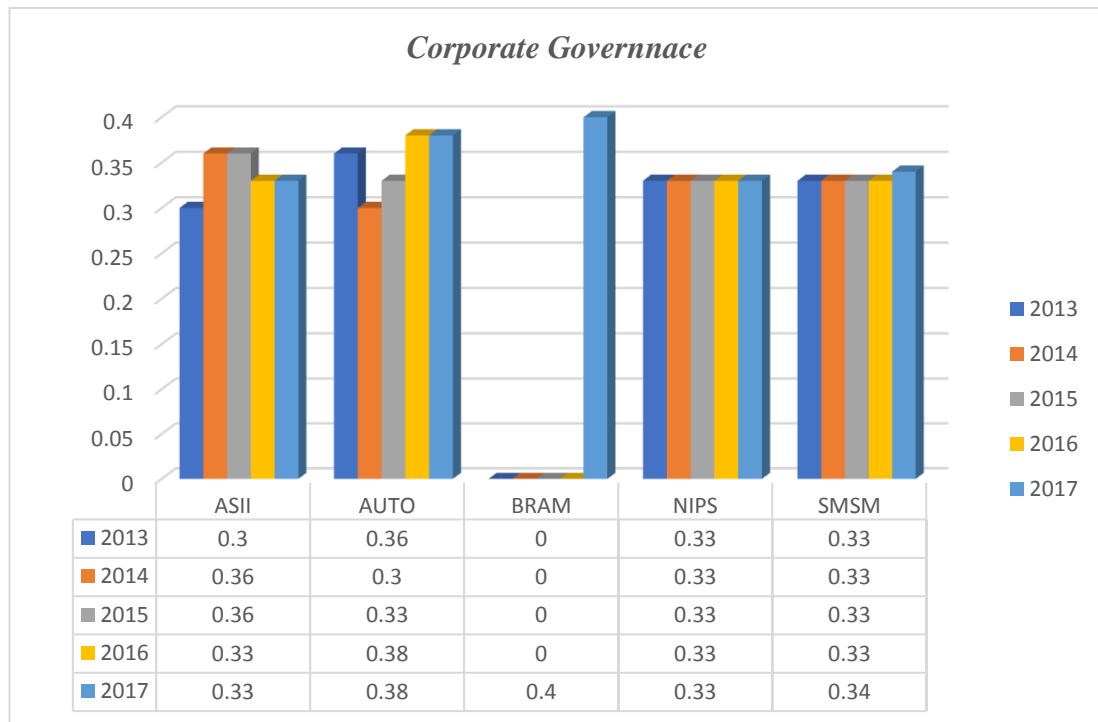
Sumber: Nurainun Bangun dan Vincent (2008)

Tabel 13
Data Dewan Komisaris Independen Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2013-2017

Kode Perusahaan	Komisaris Independen					Rata-rata Perubahan
	2013	2014	2015	2016	2017	
ASII	0,30	0,36	0,36	0,33	0,33	0,34
AUTO	0,36	0,30	0,33	0,38	0,38	0,35
BRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,33
NIPS	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
SMSM	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,08
Rata-rata	0,27	0,27	0,27	0,28	0,36	0,29
Maksiman	0,36	0,36	0,36	0,38	0,40	0,37
Minimun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,07

Sumber: www.idx.co.id data diolah penulis (2018)

Untuk memudahkan pembaca, penulis menyajikan grafik pertumbuhan *debt to equity ratio* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang mengalami fluktuasi pada tahun 2013-2017 sebagai berikut:



Gambar 7
Grafik Corporate Covornance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan
Komponen Periode 2013-2017

Berdasarkan Tabel 13 dan Gambar 7 terlihat bahwa dari kelima perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2013-2017 nilai rata-rata komisaris independen cenderung mengalami kenaikan dan penurunan dengan masing-masing nilai rata-rata pada tahun 2013 sebesar 0,27 pada tahun 2014 sebesar 0,27 pada tahun 2015 sebesar 0,27 kemudian pada tahun 2016 sebesar 0,28 dan pada tahun 2017 sebesar 0,36. Untuk tahun 2013 nilai komisaris independent tertinggi terjadi pada PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) yaitu sebesar 0,36. Sedangkan untuk nilai komisaris independent terjadi pada PT Indo Kordsa Tbk (BRAM) yaitu sebesar 0,00, karena pada tahun 2013-2016 PT Indo Kordsa tidak memiliki komisaris independent hanya memiliki anggota dewan komisaris. Untuk tahun 2014 nilai komisaris independent tertinggi terjadi pada PT Astra International Tbk (ASII) yaitu sebesar 0,36. Sedangkan untuk nilai terendah pada tahun 2014 terjadi pada PT Indo Kordsa (BRAM) yaitu sebesar 0,00.

Untuk tahun 2015 nilai tertinggi komisaris independen terjadi pada PT Astra International Tbk (ASII) yaitu sebesar 0,36. Sedangkan untuk nilai terendah komisaris independen kembali terjadi pada PT Indo Kordsa (BRAM) yaitu sebesar 0,00. Untuk tahun 2016 nilai tertinggi kembali terjadi pada PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) yaitu sebesar 0,38. Sedangkan untuk nilai terendah komisaris independen

tahun 2016 terjadi pada PT Indo Kordsa BRAM yaitu sebesar 0,00. Pada tahun 2017 nilai tertinggi terjadi pada PT Indo Kordsa Tbk (BRAM) karena pada tahun 2017 PT Indo Kordsa Tbk memiliki 2 orang dewan komisaris independen. Sedangkan untuk nilai terendah terjadi pada tiga perusahaan yaitu PT Astra International Tbk (ASII), PT Nipress Tbk (NIPS), dan PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) yaitu sebesar 0,33.

4.2.4. Kondisi *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI

Penghindaran pajak perusahaan pada penelitian ini diukur dengan metode perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan harapan mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Dyreng et al, (2010). Mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Sumber: Dyreng et al, 2010)

Berikut data penghindaran pajak yang diukur menggunakan metode *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen selama periode 2013-2017 yang disajikan pada Tabel 14:

Tabel 14
Data Perhitungan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Perusahaan dengan Metode *Cash ETR* Periode 2013-2017

Kode Perusahaan	<i>Cash Effective Tax Rate</i>					Rata-rata Perubahan
	2013	2014	2015	2016	2017	
ASII	0,23	0,20	0,33	0,24	0,22	0,25
AUTO	0,20	0,24	0,48	0,28	0,41	0,32
BRAM	0,67	0,34	0,28	0,22	0,30	0,36
NIPS	0,32	0,35	0,44	0,25	0,47	0,36
SMSM	0,20	0,25	0,26	0,21	0,23	0,23
Rata-rata	0,32	0,28	0,36	0,24	0,32	0,30
Maksimum	0,67	0,35	0,48	0,28	0,47	0,45
Minimum	0,20	0,20	0,26	0,21	0,22	0,22

Berdasarkan Tabel 14, nilai rata-rata *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2013-2017 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan dengan masing-masing rata-rata pada tahun 2013 sebesar 0,32 pada tahun 2014 turun menjadi 0,28 pada tahun 2015 naik menjadi 0,36 kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 0,24 dan pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,32. Untuk tahun 2013 nilai CETR tertinggi pada PT Indo Kordsa Tbk (BRAM) yaitu sebesar 0,67. Untuk nilai minimum tahun 2013 nilai CETR terendah pada PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) dan

PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM). Pada tahun 2014 nilai tertinggi dimiliki oleh PT Nipress Tbk (NIPS) yaitu sebesar 0,35 sedangkan nilai terendah dimiliki oleh PT Astra International Tbk (ASII) sebesar 0,20. Untuk Tahun 2015 nilai tertinggi dimiliki oleh PT Astra Otoparts Tbk yaitu sebesar 0,48 sedangkan untuk nilai terendah dimiliki oleh PT Selamat Sempurna Tbk yaitu sebesar 0,26. Kemudian pada tahun 2016 nilai tertinggi dimiliki oleh PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) yaitu sebesar 0,28 dan nilai terendah kembali dimiliki oleh PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) yaitu sebesar 0,21. Sedangkan pada tahun 2017 nilai tertinggi dimiliki oleh PT Nipress Tbk (NIPS) sebesar 0,47 sedangkan nilai terendah dimiliki oleh PT Astra International Tbk (ASII).

4.2.5. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat sebaran data sampel, dimana peneliti menggunakan rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan dulu uji normalitas data untuk memenuhi kriteria normalitas data.

Statistik Deskriptif masing-masing variabel yang digunakan dalam seluruh model penelitian dapat dilihat dalam Tabel 15.

Tabel 15
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	25	.14	.34	.2384	.04552
ROA	25	1.98	24.09	8.7816	7.19950
DER	25	.32	2.38	.7644	.46634
KI	25	.00	.40	.2860	.12961
Valid N (listwise)	25				

(Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 23, 2018)

Berdasarkan tabel 15 diatas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 sampel dan jangka waktu pengambilan sampel selama 5 tahun maka $N=25$. Selain itu, diketahui bahwa nilai *cash effective tax rate* (Y) adalah antara 0.14 hingga 0,34 dengan rata-rata sebesar 0,2384 dan standar deviasi 0,04552.

Nilai *return on asset* (X_1) adalah antara 1,98 hingga 24,09 dengan rata-rata sebesar 8,7816 dan standar deviasi 7,19950. Nilai *debt to equity ratio* (X_2) adalah 0,32 hingga 2,38 dengan rata-rata sebesar 0,7644 dan standar deviasi 0,46634 sedangkan nilai komisararis independent (X_3) adalah antara 0,00 hingga 0,40 dengan rata-rata sebesar 0,2860 dan standar deviasi 0,12961.

8.3. Analisis Data

Dalam menguji “Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017” dilakukan dengan pengujian

statistik. Analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 23 adapun variabel yang diteliti oleh penulis yaitu *Profitabilitas* (X_1), *Leverage* (X_2), *Corporate Governance* (X_3) dan *Tax Avoidance* (Y). Beberapa pengujian yang dilakukan yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), uji hipotesis (uji koefisien determinasi, uji koefisien secara parsial atau uji t, dan uji koefisien secara simultan atau uji F).

Sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan dulu uji normalitas data untuk memenuhi kriteria normalitas data. Penulis melakukan outlier dari data yang di uji karena data *outlier* harus dikeluarkan. Sehingga data yang tadinya $N=40$ menjadi $N=25$ karena untuk memenuhi data yang BLUE (*Best, Linier, Unbiased, Estimator*).

4.3.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased, Estimator*). Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi distribusi secara normal atau tidak. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P-P *Plot of regression standardized residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, *poisson*, *uniform*, atau *exponential*. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berikut hasil dari uji normalitas, yaitu:

Tabel 16
Hasil Uji Normalitas *Kolmogrov-smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	.03715423
Most Extreme Differences	Absolute	.161
	Positive	.093
	Negative	-.161
Test Statistic		.161
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 23, 2018)

Berdasarkan Tabel 16 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) yang diperoleh yaitu 0,095. Karena nilai signifikansi yang dihasilkan

berada di atas 0,05 maka nilai residual tersebut telah normal. Sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas atau dapat dibuktikan dengan gambar berikut ini:

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala korelasi diantara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Suatu model regresi yang baik akan bebas dari multikolinieritas. Dalam penelitian ini menggunakan multikolinieritas dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Model dinyatakan bebas dari gangguan multikolinieritas jika mempunyai nilai *tolerance* > dari 0,1 atau $VIF < 10$. Berikut uji multikolinieritas perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

Tabel 17
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.294	.025		11.627	.000		
	ROA	-.001	.001	-.181	-.934	.361	.845	1.183
	DER	.008	.019	.080	.418	.680	.867	1.153
	KI	-.179	.065	-.509	-2.754	.012	.929	1.077

a. Dependent Variable: CETR

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, 2018)

Berdasarkan Tabel 17 di atas menunjukkan semua di atas nilai *tolerance* 0,10 diantaranya yaitu nilai *return on asset* (X1) sebesar 0,845, nilai *debt to equity ratio* (X2) sebesar 0,867 dan nilai Komisaris Independen (X3) sebesar 0,929. Selain itu nilai VIF kurang dari 10, diantaranya yaitu nilai *return on asset* (X1) sebesar 1,183, nilai *debt to equity ratio* (X2) sebesar 1,153 dan nilai Komisaris Independen (X3) sebesar 1,077 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas. ROA, DER dan KI yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini tidak mempunyai penyimpangan atau adanya hubungan yang linier antara ROA, DER dan KI.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Salah satu metode yang digunakan yaitu uji *spearman's rho* dengan mengkorelasikan nilai *absolute residual* (ABS_RES) hasil regresi dengan masing-masing variabel independen dengan *absolute residual* (ABS_RES) > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut uji heteroskedastisitas perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

Tabel 18
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Spearman's rho
Correlations

			ROA	DER	KI	ABS_RES
Spearman's rho	ROA	Correlation Coefficient	1.000	-.257	-.034	-.039
		Sig. (2-tailed)	.	.215	.872	.852
		N	25	25	25	25
	DER	Correlation Coefficient	-.257	1.000	-.296	-.154
		Sig. (2-tailed)	.215	.	.150	.463
		N	25	25	25	25
	KI	Correlation Coefficient	-.034	-.296	1.000	.141
		Sig. (2-tailed)	.872	.150	.	.501
		N	25	25	25	25
	ABS_RES	Correlation Coefficient	-.039	-.154	.141	1.000
		Sig. (2-tailed)	.852	.463	.501	.
		N	25	25	25	25

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Berdasarkan Tabel 18 uji heteroskedastisitas pada perusahaan otomotif dan komponen dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*Sig. 2-tailed*) antara *Return on Assets* dengan absolut residual (ABS_RES) sebesar 0,852, *Debt to Equity Ratio* dengan absolut residual (ABS_RES) sebesar 0,463, Komisaris Independen dengan absolut residual (ABS_RES) sebesar 0,501. Dari ketiga variabel independen antara nilai signifikansi (*Sig. 2-tailed*) dengan absolut residual (ABS_RES) > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik mensyaratkan tidak terjadinya autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan (error) suatu data pada periode lainnya. *Run Test* merupakan bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Menurut Ghazali (2016) dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Run test* adalah:

- a. Jika nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- b. Jika nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 19
Hasil Uji Run Test
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.01165
Cases < Test Value	12
Cases >= Test Value	13
Total Cases	25
Number of Runs	10
Z	-1.220
Asymp. Sig. (2-tailed)	.223

a. Median

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 23.0

Berdasarkan tabel 19 diketahui nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,223 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak terselesaikan dengan *Durbin Watson* dapat teratasi melalui uji *Run test* sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan.

4.3.3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis terdiri dari analisis determinasi, uji koefisien regresi secara parsial (uji t), dan uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F).

1. Analisis Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi atau ketepatan perkiraan model (*goodness of fit*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel dependen amat terbatas. Berikut ini adalah hasil perhitungan R^2 dan koefisien determinasi dalam penelitian ini terkait dengan *return* saham sebagai variabel dependen.

Tabel 20
Hasil Uji Model Summary
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.578 ^a	.334	.239	.03972

a. Predictors: (Constant), KI, DER, ROA

b. Dependent Variable: CETR

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, 2018)

Hasil Tabel 20 menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R square*), koefisien detrmniasi yang disesuaikan (*adjusted R Square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std Error of the Estimate*), antara lain:

- a. R menunjukkan nilai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika mendeteksi 1 maka hubungan semakin lemah. Angka R yang didapat yaitu 0,578 artinya korelasi antara variabel ROA, DER, dan KI terhadap CETR sebesar 0,578. Hal ini berarti terjadi hubungan yang sangat erat karena nilai mendeteksi satu.
 - b. *R Square* (R^2) atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, nilai R^2 sebesar 0,334 artinya persentase sumbangan pengaruh variabel ROA, DER dan KI terhadap CETR sebesar 33,4% sedangkan sisanya sebesar 66,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
 - c. *Adjusted R Square*, adalah *R Square* yang telah disesuaikan, nilai sebesar 0,239 ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, *adjusted R Square* biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen.
 - d. *Standard Error of the Estimate*, adalah ukuran kesalahan prediksi, nilai sebesar 0,3972 artinya kesalahan yang dapat memprediksi *cash effective tax rate*.
2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
- Untuk menguji signifikansi dari nilai koefisien regresi semua variabel independen dalam persamaan regresi, dapat dilihat dari nilai t dan nilai signifikansinya. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah secara parsial masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 21
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.294	.025		11.627	.000
ROA	-.001	.001	-.181	-.934	.361
DER	.008	.019	.080	.418	.680
KI	-.179	.065	-.509	-2.754	.012

a. Dependent Variable: CETR

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, 2018)

Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$. T_{tabel} dicari pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dengan tingkat derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $df = 25-3-1 = 21$ (n adalah jumlah data

dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,07961. Analisis uji t berdasarkan Tabel 21 diatas adalah sebagai berikut:

a. *Return on Asset* (X_1) terhadap *Cash Effective Tax Rate* (Y)

Berdasarkan signifikansi, jika ($t_{hitung} > t_{tabel}$) atau ($-t_{hitung} < -t_{tabel}$) dengan signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika ($t_{hitung} < t_{tabel}$) atau ($-t_{hitung} > -t_{tabel}$) dengan signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Pada Tabel 21 terlihat bahwa signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,361 dan $t_{hitung} = -0,934$. Karena signifikansi pada uji t lebih dari 0,05 ($0,361 > 0,05$) dimana nilai ($-t_{hitung} < -t_{tabel}$) ($-0,934 > -2,07961$), maka H_0 diterima dan H_a tolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap CETR.

b. *Debt to Equity Ratio* (X_2) terhadap *Cash Effective Tax Rate* (Y)

Berdasarkan signifikansi, jika ($t_{hitung} > t_{tabel}$) atau ($-t_{hitung} < -t_{tabel}$) dengan signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika ($t_{hitung} < t_{tabel}$) atau ($-t_{hitung} > -t_{tabel}$) dengan signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Pada Tabel 21 terlihat bahwa signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,680 dan $t_{hitung} = 0,418$. Karena signifikansi pada uji t lebih dari 0,05 ($0,680 > 0,05$) dimana nilai ($t_{hitung} < t_{tabel}$) ($0,418 > 2,07961$) maka H_0 diterima dan H_a di tolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DER secara parsial tidak berpengaruh terhadap CETR.

c. Komisararis Independen (X_3) terhadap *Cash Effective Tax Rate* (Y)

Berdasarkan signifikansi, jika ($t_{hitung} > t_{tabel}$) atau ($-t_{hitung} < -t_{tabel}$) dengan signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika ($t_{hitung} < t_{tabel}$) atau ($-t_{hitung} > -t_{tabel}$) dengan signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Pada Tabel 21 terlihat bahwa signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,012 dan $t_{hitung} = -2,754$. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,012 < 0,05$) dimana nilai ($-t_{hitung} < -t_{tabel}$) ($-2,754 > -2,07961$) maka H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkam Komisararis Independen secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap CETR.

3. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah DTA (X_1), DTL (X_2), DTE (X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap ROA (Y). Seluruh variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau jika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berikut merupakan uji F terkait dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen:

Tabel 22
Hasil Uji ANOVA
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.017	3	.006	3.509	.033 ^b
	Residual	.033	21	.002		
	Total	.050	24			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), KI, DER, ROA

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Berdasarkan Tabel 22 menunjukkan hasil uji F secara simultan variabel independen F_{hitung} sebesar 3,509. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha=5\%$ df 1 (jumlah variabel-1) atau $(4-1)=3$ dan df 2 ($n-k-1$) atau $25-3-1=21$ (n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 3,07. Dengan demikian, nilai ($F_{hitung} > F_{tabel}$) atau $(3,509 > 3,07)$. Jika dilihat dari signifikansi didapat nilai sebesar 0,033 ($0,033 < 0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu *profitabilitas* (ROA), *leverage* (DER) dan komisariss independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Tujuan utama untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel independen. Hasil uji analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.294	.025	
	ROA	-.001	.001	-.181
	DER	.008	.019	.080
	KI	-.179	.065	-.509

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : pengolahan data SPSS 23.0

Hasil pada Tabel 23 dapat dibuat model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 0,294 + (-0,001) \text{ ROA} + (0,008) \text{ DER} + (-0,179) \text{ KI} + e$$

Keterangan:

$Y = Tax Avoidance$

$a =$ Konstanta

$b_1 =$ Koefisien regresi *return on asset*

$X_1 = Return On Asset$

$b_2 =$ Koefisien regresi *debt to equity ratio*

$X_2 = debt to equity ratio$

$b_3 =$ Koefisien regresi komisaris independen

$X_3 =$ Komisaris Independen

$e =$ Tingkat error

Dari hasil persamaan model regresi linier berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta

Konstanta sebesar 0.294 artinya jika variabel independent yaitu *return on asset*, *debt to equity ratio* dan komisaris independent nilainya adalah nol, maka variabel dependen yaitu penghindaran pajak nilainya positif sebesar 0,294.

2. Koefisien Regresi Variabel *Return On Asset*

Nilai koefisien regresi variabel ROA (b_1) bernilai negative yaitu -0,001. Hal ini menunjukkan bahwa ROA memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan arah *tax avoidance* (CETR). Setiap kenaikan ROA sebesar satu satuan maka *tax avoidance* (CETR) akan menurun sebesar 0,001 dengan asumsi bahwa variabel independent lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

Koefisien bertanda negatife, hal ini menunjukkan bahwa ROA berhubungan negatif terhadap *tax avoidance* (CETR) pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

3. Koefisien Regresi Variabel *Debt to Equity Ratio*

Nilai koefisien regresi variabel DER (b_2) bernilai positif yaitu 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan DER sebesar satu satuan maka *tax avoidance* (CETR) juga akan meningkat sebesar 0,008 dengan asumsi bahwa variabel independent lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

Koefisien bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa DER berhubungan positif terhadap *tax avoidance* (CETR) pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017.

4. Koefisien Regresi Variabel Komisaris Independen

Nilai koefisien regresi variabel komisaris independent (b_3) bernilai negatif -0,179. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan komisaris independen sebesar satu satuan, maka *tax avoidance* (CETR) akan menurun sebesar 0,179 dengan asumsi bahwa variabel independent lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

Koefisien bertanda negatif, hal ini menunjukkan bahwa KI berhubungan negatif terhadap *tax avoidance* (CETR) pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017.

4.4. Pembahasan

4.4.2. Pengaruh *Profitabilitas, Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI periode 2013-2017.

Hasil didasarkan pada penelitian yang telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan uji t (parsial), dan uji F (simultan).

Berikut ini mengenai hasil dari hipotesis penelitian sehingga menghasilkan hipotesis yang diterima atau ditolak.

1. H1 : Ditolak
Nilai signifikansi *profitabilitas* (ROA) sebesar 0,361 kurang dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,361 > 0,05$). Sehingga kesimpulannya bahwa *profitabilitas* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan hipotesis ditolak.
2. H2 : Ditolak
Nilai signifikansi *leverage* (DER) sebesar 0,680 kurang dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,680 > 0,05$). Sehingga kesimpulannya bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan hipotesis ditolak.
3. H3 : Diterima
Nilai signifikansi 0,012 lebih dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,012 < 0,05$). Sehingga kesimpulannya bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan hipotesis diterima.
4. H4 : Diterima
Berdasarkan Tabel 21 secara simultan variabel independen memiliki nilai sig. Yaitu 0,033 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $3,509 > 3,07$. Sehingga *profitabilitas, leverage* dan *corporate governance* secara simultan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dan hipotesis diterima.

4.5. Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada lima perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 23 tentang pengaruh *profitabilitas, leverage* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut.

4.5.1. Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi rasio *profitabilitas*, berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba. Tingkat

profitabilitas perusahaan yang semakin naik, maka pajak yang dibayar juga akan semakin tinggi. Jika *profitabilitas* perusahaan rendah akan memilih mempertahankan keuangannya dan akan melakukan perencanaan pajaknya untuk meminimalisir beban pajaknya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar *profitabilitas* yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan mengurangi bahkan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki *profitabilitas* besar akan terlihat dalam laporan keuangan dan tentunya memiliki beban pajak yang lebih besar yang harus dibayarkan.

Dalam penelitian ini *profitabilitas* yang menggunakan indikator *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut diindikasikan tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak telah meningkat sehingga nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan asetnya secara efektif dan efisien sehingga perusahaan mampu membayar beban-beban perusahaan termasuk beban pajak perusahaan, maka perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi akan lebih memilih membayar beban pajak dari pada harus melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018), Cahyono (2016), Yunita (2017), Kurniasih (2013), Maharani (2014), Irawan (2017) dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun penelitian ini mendukung atau sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) dan Nursari (2016) yang menyatakan bahwa *profitabilitas* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4.5.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan hasil penelitian ini *leverage* yang dihitung dengan menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Ada beberapa hal yang mengakibatkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, diantaranya yaitu terkait dengan keputusan pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan ini menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

Sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

Dalam penelitian ini perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang menjadi sampel penelitian memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi. Sehingga, pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Sedangkan beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga/kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017), Kurniasih (2013), Irawan (2017), Nursari (2016), dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini mendukung atau sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018), Cahyono (2016) dan Yunita (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* dengan indikator *debt to equity ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.5.3 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian ini *corporate governance* yang dihitung dengan menggunakan indikator Komposisi Dewan Komisaris Independent berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini mengindikasikan perusahaan belum mematuhi perundang-undangan Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dan peraturan BAPEPAM No.XI.1.5 tahun 2004 dan Peraturan BEJ No 1 A Tahun 2004, yang menyatakan bahwa perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI sekurang-kurangnya memiliki 30% Dewan Komisaris Independen dari seluruh jajaran anggota Dewan Komisaris.

Pengaruh komisaris independent terhadap penghindaran pajak perusahaan dapat dijelaskan semakin banyak jumlah komisaris independent maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen maka tindakan atau indikasi untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga akan menurun. Sebaliknya jika semakin sedikit jumlah komisaris independent maka semakin kecil pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja terhadap kinerja manajemen maka tindakan atau indikasi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) semakin besar dikarenakan sedikitnya pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Variabel Dewan Komisaris Independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata (Annisa, 2012).

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2016), Annisa (2012) dan Saputra (2017) yang menyatakan dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini

mendukung atau sejalan dengan peneliti Ulfah (2017), Maharani (2014) dan Irawan (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independent berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4.5.4 Pengaruh *Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian ini *profitabilitas, leverage dan corporate governance* terhadap *tax avoidance* berpengaruh secara simultan. Hasil penelitian ini sesuai dengan H4 yang menyatakan bahwa *profitabilitas, leverage, dan corporate governance* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak secara bersama-sama.

Tinggi dan rendahnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2013-2017 menandakan bahwa dipengaruhi oleh variabel independent yang diteliti. Pernyataan tersebut didapatkan dari bukti nilai R Square yang memiliki nilai sebesar 33,4% sedangkan sisanya sebesar 66,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Berpengaruhnya variabel independent terhadap dependen menandakan perusahaan sub sektor otomotif dan komponen memanfaatkan celah praktik tindakan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan-peraturan perpajakan.

Tabel 24
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil
1	ROA → CETR	Terdapat pengaruh antara hubungan <i>profitabilitas</i> (ROA) terhadap <i>tax avoidance</i> (CETR)	Tindakan <i>profitabilitas</i> dengan indikator <i>return on asset</i> (ROA) tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor otomotif dan komponen
2	DER → CETR	Terdapat pengaruh antara hubungan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Tindakan <i>leverage</i> dengan indikator <i>debt to equity ratio</i> (DER) tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor otomotif dan komponen
3	KI → CETR	Terdapat pengaruh antara hubungan <i>corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Tindakan <i>corporate governance</i> dengan indikator dewan komisaris independent (KI) memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor otomotif dan komponen
4	ROA, DER, KI → CETR	Terdapat pengaruh antara hubungan <i>profitabilitas, leverage dan corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Tindakan <i>profitabilitas</i> (ROA), <i>leverage</i> (DER) dan <i>corporate governance</i> (KI) memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor otomotif dan komponen

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.3. Kesimpulan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini menggunakan 5 sampel perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan menggunakan regresi linear berganda, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini *profitabilitas* yang menggunakan indikator *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap perilaku penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya ROA tersebut diindikasikan tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak telah meningkat sehingga nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan assetnya secara efektif dan efisien sehingga perusahaan mampu membayar beban-beban perusahaan termasuk beban pajak perusahaan, maka perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi akan lebih memilih membayar beban pajak dari pada harus melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan. Artinya semakin besar atau kecil tingkat *leverage* suatu perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak perusahaan tersebut.
3. *Corporate Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya semakin besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independent di suatu perusahaan menyebabkan peningkatan atau penurunan penghindaran pajak suatu perusahaan.
4. *Profitabilitas*, *leverage* dan *corporate governance* berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Berpengaruhnya variabel independen terhadap dependen menandakan perusahaan sub sektor otomotif dan komponen memanfaatkan celah praktik tindakan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan.

5.4. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang terkait dengan perencanaan pajak (*tax planning*) terutama mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan agar terhindar dari sanksi administrasi pajak dan kesalahpahaman investor sehingga membuat persepsi yang buruk kepada perusahaan.
2. Bagi Investor
Sebaiknya dalam pengambilan keputusan investasi agar lebih mengkaji terlebih dahulu bagaimana kinerja suatu perusahaan dan tetap mematuhi peraturan tentang perpajakan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan hal yang wajar tetapi selalu dilakukan oleh beberapa perusahaan. Selain itu *tax avoidance* juga akan memberikan dampak yang kurang baik untuk kedua belah pihak yang bersangkutan baik dari pihak investor, perusahaan maupun pemerintah.
3. Bagi Pihak Fiskus (Pemerintah)
Guna mengurangi kesempatan perusahaan melakukan *tax avoidance*, hendaknya pihak fiskus meningkatkan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang melaporkan rugi. Perusahaan yang mengalami kerugian bisa memanfaatkan fasilitas kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan jalur pemberian kompensasi rugi fiskal ini tidak digunakan sebagai upaya *tax avoidance* perusahaan.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya:
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian karena masih banyak faktor-faktor yang berkontribusi dalam mempengaruhi *tax avoidance* yang belum diteliti, diantaranya seperti komite audit, struktur kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan, karakteristik perusahaan dan *Book Tax Gap*.
 - b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan sampel perusahaan yang tidak hanya terfokus pada sektor otomotif dan komponen saja, sehingga dapat mengetahui sektor lainnya apakah memiliki keterkaitan yang lebih besar yang dapat memperkuat atau melemahkan variabel.
 - c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode pengukuran *Corporate Governance* selain proporsi komisaris independen, seperti komite audit, atau Lembaga *scoring* seperti *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dan *The Indonesian Institute Corporate Governance* (IICG).

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa N.A. dan Kurniasih L. (2012). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 8, No. 2, 95-189. Tersedia di: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4352> [diakses pada 14 Mei 2018].
- Anthony, R.N. dan Govindarajan V. (1995), *Management Control System*. Eight Edition, International Student Edition, USA, Richard D. Irwin Inc.
- Arijanto, Agus (2011). *Etika Bisnis dan Pelaku Bisnis*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Armstrong et.al. (2013), *Corporate governance, Incentives, and Tax Avoidance*. *Journal of Empirical Finance*, vol 18.
- Bambang, R.M. (2016). *GRC (Good Governance, Risk management, And Compliance)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bangun, N. dan Vincent (2008). *Analisis Hubungan Komponen Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dengan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, *Jurnal Akuntansi/Tahun XII.No. 03. September*. Hlm. 289-302. [diakses pada 26 Juni 2018].
- Bushman, R.M. and Smith A.J. (2013). *Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance*, *Journal of Public Economics* 93 (2009) 126–14.
- Darsono, Ashari (2009). *Aplikasi Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Dyreng, et al., (2010). *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review*. 85 No 4. 1163-1189. Tersedia di: <http://taxdoctoralseminar.web.unc.edu/files/2016/02/Dyreng-Hanlon-Maydew-2010.pdf> [diakses pada 21 Juni 2018].
- Fadillah R. (2014). *Pengaruh Corporate Governance terhadap tax avoidance* (Study empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2011), Padang: Universitas Padang. Tersedia di: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658> [diakses pada 14 Mei 2018].
- Fahmi, Irham (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke-2, Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, Irham (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghazali, Imam (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Universitas Diponegoro.

- Griffin, Ricky W. dan Pustay, Michael W. (2015). *Bisnis Internasional, Sebuah Perspektif Manajerial*. Edisi 8, Jakarta: Salemba Empat.
- Hanlon, M., Slemrod, J. (2009), *What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement*, *Journal of Public Economics* 93, 126-141.
- Herawaty V. (2008). *Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 10, NO. 2, November 2008: 97-108. Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/75901-ID-peran-praktek-corporate-governance-sebag.pdf> [diakses pada 15 Mei 2018].
- Hermanto B. & Agung, M. (2015). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency*.
- Kasmir (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Kurniasih, T. & Sari, Maria M. R. (2013), *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*, *Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 18, No. 1, ISSN 1410-4628. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/6160> [diakses pada 14 Mei 2018].
- Lestari M.I dan Sugiharto T. (2007). *Kinerja Bank Devisa dan Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*, 21-22 Agustus Vol. 2. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Tersedia di: http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/588/1/TS_Rani_makalah.pdf [diakses pada 20 Mei 2018].
- Lim, Y. (2012). *Tax Avoidance, Cost Of Debt and Shareholder Activism: Evidence from Korea*. *Journal of Banking and Finance*, 35 (2011) 456-470.
- Mayangsari, V. R. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang. Tersedia di: http://eprints.undip.ac.id/47776/1/11_MAYANGSARI.pdf [diakses pada 23 Mei 2018].
- Meliyana, Ana (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Otomotif. Komponen dan Kabel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015*. Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan.

- Oktofian, M. (2015). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance* (Study Empiris Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2009-2013), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. [diakses pada 14 Mei 2018]
- Pohan, C.A. (2014). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Prasiwi, K.W. (2015). *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Universitas Diponegoro. Tersedia di: <http://eprints.undip.ac.id/45842/> [diakses pada 17 Mei 2018]
- Simarmata, Ari P. P (2012). *Pengaruh Penghindaran Pajak Jangka Panjang Pada Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variable Pemoderasi*. Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Tersedia di: [http://eprints.undip.ac.id/43388/1/10 SIMARMATA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/43388/1/10_SIMARMATA.pdf) [diakses pada 26 Mei 2018].
- Soemarsono, T. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Indeks.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sudaryono (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syamsul, M. (2008). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ulfah Q.T.P.N, (2017). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak* (Study pada Perusahaan Property dan Real Estate Periode 2011-2015). Bogor: Universitas Pakuan.
- Perundang - Undangan:
- Peraturan (Bursa Efek Jakarta) BEJ No 1 A Tahun 2004.
- Peraturan BAPEPAM No.XI.1.5 tahun 2004.
- Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TABEL PERHITUNGAN RETURN ON ASSET

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	(Dalam Jutaan Rupiah)		ROA (Return on Asset)
			LABA SETELAH PAJAK	TOTAL ASET	
1	ASII	2013	22.297.000.000	213.994.000.000	10,42
		2014	22.125.000.000	236.029.000.000	9,37
		2015	15.613.000.000	245.435.000.000	6,36
		2016	18.302.000.000	261.855.000.000	6,99
		2017	23.165.000.000	295.646.000.000	7,84
2	AUTO	2013	1.058.015.000.000	12.617.678.000.000	8,39
		2014	956.409.000.000	14.380.926.000.000	6,65
		2015	322.701.000.000	14.339.110.000.000	2,25
		2016	483.421.000.000	14.612.274.000.000	3,31
		2017	547.781.000.000	14.762.309.000.000	3,71
3	BRAM	2013	67.554.729.030	2.913.517.118.844	2,32
		2014	197.626.405.480	3.835.227.953.480	5,15
		2015	173.452.894.770	4.025.858.610.490	4,31
		2016	299.617.183.752	3.977.868.810.820	7,53
		2017	332.846.274.996	4.125.144.165.048	8,07
4	NIPS	2013	33.872.112.000	798.407.625.000	4,24
		2014	50.134.988.000	1.206.854.399.000	4,15
		2015	30.671.339.000	1.547.720.090.000	1,98
		2016	65.683.137.000	1.777.956.390.000	3,69
		2017	44.110.825.000	1.897.962.447.000	2,32
5	SMSM	2013	350.777.803.941	1.701.103.245.176	20,62
		2014	421.467.000.000	1.749.395.000.000	24,09
		2015	461.307.000.000	2.220.108.000.000	20,78
		2016	502.192.000.000	2.254.740.000.000	22,27
		2017	555.388.000.000	2.443.341.000.000	22,73

LAMPIRAN 2

TABEL PERHITUNGAN *DEBT TO EQUITY RATIO*

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	(Dalam Jutaan Rupiah)		DER (<i>Debt to Equity Ratio</i>)
			TOTAL LIABILITAS	TOTAL EKUITAS	
1	ASII	2013	107.806.000.000	106.188.000.000	1,02
		2014	115.705.000.000	120.324.000.000	0,96
		2015	118.902.000.000	126.533.000.000	0,94
		2016	121.949.000.000	139.906.000.000	0,87
		2017	139.317.000.000	156.329.000.000	0,89
2	AUTO	2013	3.058.924.000.000	9.558.754.000.000	0,32
		2014	4.244.369.000.000	10.136.557.000.000	0,42
		2015	4.195.684.000.000	10.143.426.000.000	0,41
		2016	4.075.716.000.000	10.536.558.000.000	0,39
		2017	4.003.233.000.000	10.759.076.000.000	0,37
3	BRAM	2013	928.401.354.783	1.985.115.764.061	0,47
		2014	1.612.813.121.080	2.222.414.832.400	0,73
		2015	1.502.287.101.595	2.523.571.508.895	0,60
		2016	1.320.971.693.420	2.656.897.117.400	0,50
		2017	1.184.288.557.056	2.940.855.607.992	0,40
4	NIPS	2013	562.461.853.000	235.945.772.000	2,38
		2014	630.960.175.000	575.894.224.000	1,10
		2015	938.717.411.000	609.002.679.000	1,54
		2016	935.375.496.000	842.580.894.000	1,11
		2017	1.018.449.877.000	879.512.570.000	1,16
5	SMSM	2013	694.304.234.869	1.006.799.010.307	0,69
		2014	602.558.000.000	1.146.837.000.000	0,53
		2015	779.860.000.000	1.440.248.000.000	0,54
		2016	674.685.000.000	1.580.055.000.000	0,43
		2017	615.157.000.000	1.828.184.000.000	0,34

LAMPIRAN 3**PERHITUNGAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS INDEPENDENT**

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	JML. ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN	JML. SELURUH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN
1	ASII	2013	3	10	0,30
		2014	4	11	0,36
		2015	4	11	0,36
		2016	4	12	0,33
		2017	4	12	0,33
2	AUTO	2013	4	11	0,36
		2014	3	10	0,30
		2015	3	9	0,33
		2016	3	8	0,38
		2017	3	8	0,38
3	BRAM	2013	0	7	0,00
		2014	0	13	0,00
		2015	0	5	0,00
		2016	0	5	0,00
		2017	2	5	0,40
4	NIPS	2013	1	3	0,33
		2014	1	3	0,33
		2015	1	3	0,33
		2016	1	3	0,33
		2017	1	3	0,33
5	SMSM	2013	1	3	0,33
		2014	1	3	0,33
		2015	1	3	0,33
		2016	1	3	0,33
		2017	1	3	0,33

LAMPIRAN 4

PERHITUNGAN CETR (CASH EFFECTIVE TAX RATE)

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	(Dalam Jutaan Rupiah)		CETR (Cash Effective Tax Rate)
			BEBAN PAJAK PENGHASILAN	LABA SEBELUM PAJAK	
1	ASII	2013	6.382.000.000	27.523.000.000	0,23
		2014	5.588.000.000	27.352.000.000	0,20
		2015	6.498.000.000	19.630.000.000	0,33
		2016	5.426.000.000	22.253.000.000	0,24
		2017	6.369.000.000	29.196.000.000	0,22
2	AUTO	2013	250.730.000.000	1.268.604.000.000	0,20
		2014	267.357.000.000	1.108.055.000.000	0,24
		2015	206.244.000.000	433.596.000.000	0,48
		2016	180.533.000.000	648.907.000.000	0,28
		2017	289.787.000.000	711.936.000.000	0,41
3	BRAM	2013	68.667.682.242	102.315.465.498	0,67
		2014	91.025.943.120	271.159.481.840	0,34
		2015	71.291.621.940	252.233.132.460	0,28
		2016	89.711.365.840	417.021.919.144	0,22
		2017	137.957.563.404	461.572.746.024	0,30
4	NIPS	2013	14.527.833.000	45.584.169.000	0,32
		2014	23.676.679.000	67.389.703.000	0,35
		2015	18.212.665.000	41.752.147.000	0,44
		2016	22.017.708.000	88.566.134.000	0,25
		2017	27.950.553.000	59.678.267.000	0,47
5	SMSM	2013	92.496.560.233	458.595.417.885	0,20
		2014	136.033.000.000	541.150.000.000	0,25
		2015	150.513.000.000	583.717.000.000	0,26
		2016	135.020.000.000	658.208.000.000	0,21
		2017	167.001.000.000	720.638.000.000	0,23